

Jainuri  
Tri Sulistyaniingsih  
Salahudin



# CATATAN POLITIK DI TAHUN POLITIK



Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang



# CATATAN POLITIK DI TAHUN POLITIK

Sistem politik demokrasi menghendaki adanya peran aktif masyarakat untuk mendiskusikan dan mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa terutama persoalan politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya. Apabila dalam sistem politik demokrasi tidak terdapat proses dialektika maka itu merupakan sebuah pretanda kehancuran demokrasi menuju oligarki politik.

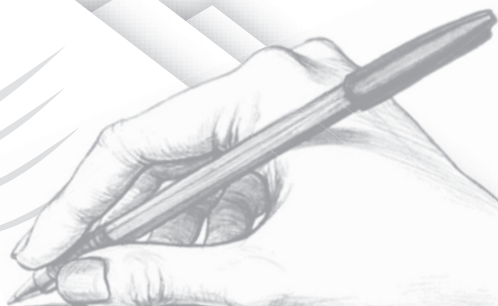
Buku kecil dan sederhana ini merupakan bentuk ulaharum dan diikhtisarkan terfokus kami dalam melihat dan mendiskusikan persoalan-persoalan bangsa terutama terkait dengan permasalahan demokrasi, krisis kepemimpinan, menguatnya money politics, buruknya kinerja partai politik, menguatnya praktik korupsi di berbagai instansi politik dan pemerintahan, dan buruknya praktik-praktik politik dan pemerintahan di era liberal. Buku ini dikhususkan untuk para aktivis mahasiswa yang belajar pada kajian demokrasi, pemerintahan, kebijakan, dan praktik-praktik politik.



Erwan Iku, Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang



Jainuri  
Tri Sulistyaningsih  
Salahudin



# CATATAN POLITIK DI TAHUN POLITIK



Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Malang



# CATATAN POLITIK DI TAHUN POLITIK

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved  
Cetakan Pertama, Maret 2014  
xiv + 112 hal, 15.5 cm x 23 cm  
ISBN: 978-6027-636-55-2

**Penulis** : Jainuri  
Tri Sulistyarningsih  
Salahudin  
**Editor** : Mapa  
**Perancang Sampul** : Ibnu Teguh  
**Penata Letak** : Ibnu Teguh

## Diterbitkan oleh :

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Malang

## *bekerjasama dengan :*

Buku Litera Yogyakarta,  
Minggiran MJ II/ 1378 RT. 63/17  
Kel. Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta  
Telp. 0274-388895, 081 7940 7446  
E-mail: bukulitera@gmail.com, matapadi\_media@yahoo.com

## Dicetak oleh :

Mata Padi Presindo,  
Minggiran MJ II/ 1378 Rt. 63/17, Kel. Suryodiningratan,  
Mantrijeron, Yogyakarta  
Telp. 0274-388895, 081 7940 7446  
E-mail: bukulitera@gmail.com, matapadi\_media@yahoo.com

*Buku Sederhana Ini Kami Persembahkan  
Untuk Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang*

## KATA PENGANTAR

Politik diumpamakan sebagai sebuah permainan. Di dalam permainan itu terdapat sekelompok orang berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Di dalam permainan apapun termasuk permainan politik pasti terdapat sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Karena itu, para kompetitor politik atau yang dikenal politisi harus mematuhi sejumlah peraturan permainan politik yang berlaku.

Dalam negara demokrasi, peraturan permainan politik tentu searah dengan nilai-nilai demokrasi. Di negara Indonesia, misalnya, memiliki peraturan permainan politik yang searah dengan nilai-nilai demokrasi berupa kebebasan, keadilan, dan persamaan. Karena itu, peraturan permainan politik di Indonesia membolehkan sistem multi partai, pemilihan langsung, dan semua warga negara memiliki hak pilih dan dipilih. Artinya, semua warga negara berkesempatan untuk terlibat aktif dalam permainan politik.

Sayangnya, acapkali pada praktik permainan politik peraturan permainan politik cenderung diabaikan (tidak ditaati dan dipatuhi). Sehingga kompetisi politik tidak berjalan dengan baik dan melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab. *Money politics*, misalnya, menjadi kebiasaan

politik politisi dalam permainan politik. Padahal dalam peraturan permainan politik demokrasi *money politics* diharamkan untuk diterapkan oleh siapapun.

Praktik *money politics* di Indonesia seolah tumbuh subur dan menggurita diberbagai level lapisan sosial politik. Praktik *money politics* berdampak pada rusaknya manajemen pemerintahan. Pemimpin politik yang lahir dari *money politics* secara langsung berdampak pada manajemen pemerintahan yang korup. Ambil contoh, pada pemilu 2009 lalu politisi mempraktikkan *money politics* dalam politik sehingga berdampak pada terciptanya manajemen pemerintahan saat ini yang korup (baca hasil survey Transparency International 2013).

Manajemen pemerintahan yang korup secara langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik yang buruk. Pemerintah seolah tidak lagi bekerja untuk melayani rakyatnya namun kesibukannya untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkaya diri sendiri dan golongan-golongan tertentu. Pelayanan publik yang buruk membawa implikasi minimnya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurun, dan pada akhirnya Indonesia menjadi negara yang terbelakang, *powerless*, dan tak berdaya di mata dunia.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran di tengah kehidupan masyarakat memicu terbentuknya budaya apatisme terhadap negara dan pemerintahan termasuk apatisme dalam dunia politik. Masyarakat tidak percaya terlibat dalam permainan politik dapat merubah hidup mereka. Pada titik ini terbentuk "budaya" golput (golongan putih). Hemat kami, budaya golput adalah ancaman serius bagi negara demokrasi terutama bagi negara-negara berkembang yang menganut demokrasi seperti Indonesia. Ketika golput terbentuk maka politik demokrasi hanya dikuasai oleh politisi-politisi tertentu sehingga permainan politik demokrasi mengahar pada permainan politik oligarki. Dan pada titik ini demokrasi hanya menjadi *lipstik services* elit politik (demokrasi hiasa bibir).

Buku kecil ini merupakan catatan-catatan deskriptif kami mengenai persoalan-persoalan politik yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut kami, perjalanan politik Indonesia pasca reformasi

1998 penuh dengan persoalan. Persoalan yang paling krusial adalah krisis kepemimpinan politik, menguatnya korupsi dalam manajemen pemerintahan, menguatnya *money politics* dalam praktik politik, dan melemahnya praktik politik dan demokrasi di aras lokal.

Semoga buku kecil ini menginspirasi pembaca untuk mendiskusikan lebih lanjut persoalan-persoalan bangsa sebagai upaya menemukan solusi terbaik dalam mewujudkan politik demokrasi yang bermartabat dan berkemajuan sehingga nantinya terwujud kehidupan bangsa yang sejahtera, dan berdaya saing.

Malang, 16 Februari 2014

Tim Penulis





## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kepada Allah SWT yang maha luas ilmunya, atas rahmat dan hidayahnya yang dicurahkan kepada kami sehingga buku kecil dan sederhana ini dapat disusun dengan baik. Buku ini disusun bukan dimaksudkan sebagai acuan pembaca namun merupakan paparan opini penulis yang nantinya diharapkan pembaca dapat mengulas dan mendiskusikan kembali opini-opini kami tentang berbagai persoalan bangsa. Beberapa opini kami yang dituangkan dalam buku ini pernah dimuat di media massa cetak dan online.

Kendati buku ini merupakan opini namun kami mencoba membangun argumen *base on date* dan realitas sosial politik yang nampak akhir-akhir ini. Argumen-argumen yang dibangun tentu melalui diskusi dan interaksi intelektual dengan berbagai pihak terutama dengan rekan-rekan kami di kampus khususnya para dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Drs. Krishno Hadi, MA., Dr. Asep Nurjaman, M.Si., Drs. Imam Hidajat, MM., Yana Syafri YH., M.IP, dan Hevi Kurnia Hardini, M.Gov.

Kami juga menyadari opini-opini yang dituangkan dalam buku ini bagian dari hasil interaksi intelektual dengan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui diskusi dalam proses belajar mengajar melahirkan ide-ide atau gagasan-gagasan tentang persoalan politik, pemerintahan,

kepemimpinan, kebijakan, dan sosial budaya. Karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.

Buku kecil ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kami mengharap kritikan dan saran dari pembaca untuk perbaikan kedepan nanti sehingga menjadi lebih baik. Kritikan dan saran dapat disampaikan melalui [udin.pemerintahan@gmail.com](mailto:udin.pemerintahan@gmail.com).  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 16 Februari 2014  
Tim Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** \_ vii

**UCAPAN TERIMA KASIH** \_ xi

**DAFTAR ISI** \_ xiii

**BAGIAN I :**

**MORAL POLITIK POLITISI** \_ 1

- I. Krisis Moral Politik Politisi \_ 3
- II. Demokrasi Antara Popularitas Dan Kualitas \_ 8
- III. Nirmoral Dan Integritas Pejabat Negara \_ 12
- IV. Pancasila Di Tengah Problematika Bangsa \_ 16
- V. Dinasti Politik Mengancam Demokrasi \_ 20

**BAGIAN KEDUA :**

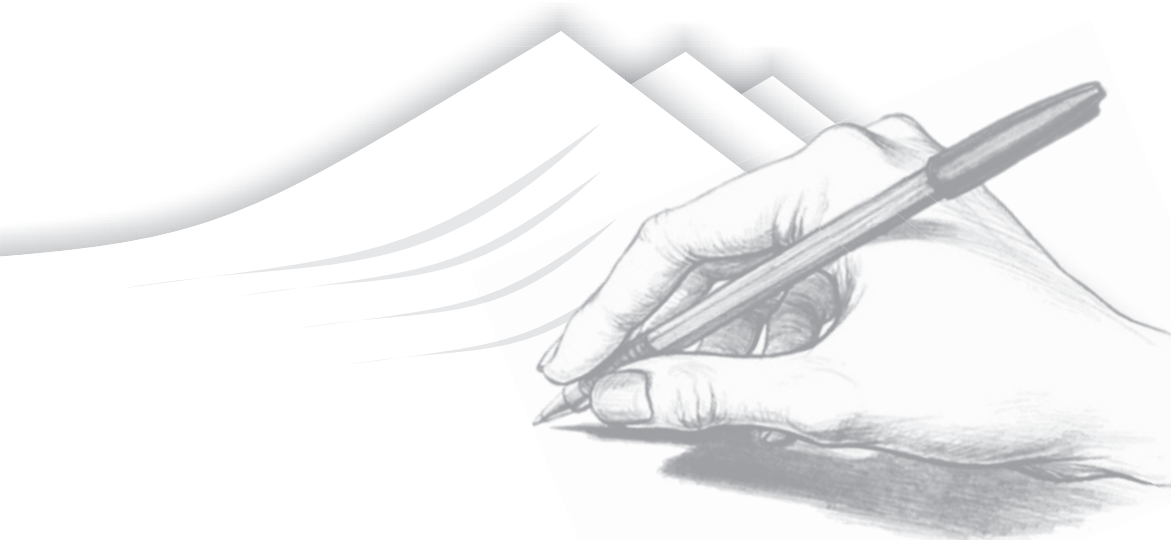
**DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK** \_ 25

- I. Partai Politik Mengabaikan Demokrasi \_ 27
- II. Berharap Kinerja Baik Partai Politik \_ 31
- III. Eksploitasi Kemiskinan Dalam Pemilu \_ 35
- IV. Menakar Kualitas Partai Politik \_ 40
- V. Golput Bukan Keinginan Rakyat \_ 45
- VI. Korupsi Institusi Politik Demokrasi \_ 50
- VII. Menakar Kualitas Pemilu 2014 \_ 55
- VIII. Menuju Negara Konstruktif \_ 59
- IX. Mencermati Implementasi Proyek E-Ktp \_ 64

**BAGIAN KETIGA :**  
**DINAMIKA POLITIK LOKAL \_ 69**

- I. Korupsi Dan Otonomi Daerah \_ 71
- II. Refleksi Makna Visi Politik Dalam Pilgub Jatim \_ 75
- III. Refleksi Dinamika Demokrasi Di Pilgub Jatim \_ 80
- IV. Demokrasi Desa Yang Digadaikan \_ 84
- V. Adipura Kencana Dan Wajah Lingkungan Kota \_ 88
- VI. Malang Kota Warisan Budaya Dunia? \_ 92
- VII. Wajah Baru Pemimpin Kota Malang \_ 96
- VIII. Merindukan Pemimpin Yang Kuat \_ 100

**SUMBER TULISAN \_ 105**  
**TENTANG PENULIS \_ 107**



Bagian Pertama

# MORAL POLITIK POLITISI



## KRISIS MORAL POLITIK POLITISI

**P**olitisi kita semakin jauh dari simpati publik. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan masyarakat semakin tidak percaya terhadap komitmen moral politisi dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Hanya 37, 5 persen publik yang menyatakan masih percaya terhadap komitmen moral politisi untuk menjalankan politik dengan baik dan benar. Sedangkan, 51,5 persen publik tidak percaya terhadap komitmen moral politisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagi publik, keberadaan politisi tidak membawa arti positif dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang makmur dan sejahtera, justru politisi membuat negara semakin jauh dari cita-cita luhur bangsa. Tindakan korupsi politisi, misalnya, dari hari ke hari selalu menghiasi pemberitaan media massa. Modus korupsi politisi dilakukan dengan berbagai bentuk.



## Korupsi dan janji palsu

Akhir-akhir ini, politisi tampak senang melakukan tindakan korupsi dengan modus pencucian uang. Uang dari hasil korupsi dijadikan dalam bentuk barang seperti rumah mewah, mobil mewah, dan barang-barang mewah lainnya. Yang menyakitkan lagi, adalah uang dari hasil korupsi dijadikan sebagai modal untuk mendapatkan dan memiliki perempuan-perempuan cantik, entah dijadikan sebagai simpanan ataupun sebagai istri.

Perkembangan kasus korupsi di Indonesia dapat dibilang *fantastis* dan ironis. Pada tahun 2011 Transparansi International Indonesia (TII) menempatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 3,0 (IPK menggunakan angka 0-10. Angka 0 dipersepsikan sangat korup, sedangkan 10 bersih dari korupsi). Tahun 2012 Transparansi International Indonesia (TII) kembali menempatkan IPK Indonesia pada angka 32. Pada tahun 2012 TII menggunakan formula yang berbeda dari tahun 2011. Jika pada metode yang lama (2011), IPK dihitung dengan skor 0-10 (0 dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih) diubah menjadi 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih) (Salahudin, Okezone.com).

Selain korupsi, perilaku buruk lain politisi adalah senang berjanji kepada rakyat tanpa diikuti tindakan nyata. Banyak politisi yang memberi janji kepada rakyat tanpa bukti nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Lidah tak bertulang", pribahasa ini tampak nyata dalam keseharian politisi-politisi kita. Kenaikan harga BBM Bersubsidi, misalnya, adalah bukti perilaku politisi yang tidak menunjukkan komitmen baik kepada rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, mereka berjanji sumpah serapa untuk berjuang kepentingan rakyat. Namun, janji ini hanya kata-kata yang menyakitkan. Semua masyarakat melihat proses *voting* penentuan kebijakan kenaikan harga BBM. Pada voting itu tampak nyata mayoritas politisi menampakkan perilaku arogansi yang tidak lagi mengingat dan memikirkan janji-janji yang pernah disampaikan kepada rakyat. Mereka merasionalisasikan kenaikan BBM bersubsidi tanpa mempertimbangkan nasib rakyat yang diwakilinya.

## **Lahirnya masyarakat golput**

Prilaku politisi inilah yang menciptakan antipati publik terhadap mereka (politisi). Fenomena antipati ini tentu membahayakan bagi berlangsungnya demokrasi. Antipati publik terhadap politisi berdampak luas terhadap persoalan-persoalan lain seperti lahirnya golput dan lemahnya legitimasi konstitusional. Golput sangat berbahaya untuk keberlangsungan demokrasi. Manakala golput tercipta secara langsung demokrasi akan sirna. Politik dan institusi-institusi negara diisi oleh segelintir atau sekelompok orang yang melakukan tindakan tanpa rasa tanggung jawab layaknya dalam negara aristokrasi dan monarki.

Masyarakat dipandang sebagai pelengkap yang tak berarti bagi kehidupan bangsa dan negara. Pada sisi lain, golput secara langsung membiarkan persoalan buruk terus berlangsung sehingga negara bukan lagi sebagai institusi moral seperti yang dipikirkan legenda politik Plato dan Aristoteles. Pada konteks ini, bagi masyarakat, negara adalah institusi yang tak berarti. Masyarakat acuh dengan urusan-urusan politik. Jejak pendapat Kompas tahun 2008, 2011, dan tahun 2012 menunjukkan masyarakat tidak lagi mempercayai Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan tidak percaya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Artinya, masyarakat tidak lagi percaya kepada negara.

Pada level ini, politisi semakin leluasa melakukan tindakan-tindakan buruk seperti yang dijelaskan di atas. Politisi membuat kebijakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya, tentunya menguntungkan mereka. Institusi atau lembaga-lembaga negara, bagai boneka yang diatur seenaknya oleh politisi. Proses buruk bernegara seperti ini menciptakan persoalan-persoalan serius berupa kemiskinan, pengangguran, kelaparan, diskriminasi, kriminalitas, terorisme, dan konflik sosial politik vertikal dan horizontal. Persoalan-persoalan tersebut tampak nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah persoalan ini terus dibiarkan, jika tidak, siapa yang bertanggungjawab untuk memperbaikinya? Mengingat negara Indonesia menganut sistem demokrasi (negara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat), maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah rakyatlah yang bertanggungjawab atas persoalan bangsa dan negara. Rakyat memiliki hak dan kewajiban

konstitusional untuk membawa bangsa menuju yang lebih baik, bermartabat, dan berdaya saing. Masyarakat dapat memilih politisi yang berkualitas, integritas, dan memiliki moralitas tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Masyarakat diharapkan mampu memilih politisi minimal seperti yang disebutkan tersebut.

Persoalannya adalah masyarakat sudah terlanjur antipati terhadap politik, tidak lagi percaya kepada politisi, tidak lagi percaya kepada hukum serta tidak percaya kepada falsafah dan konstitusi negara. Faktor yang melatarbelakangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik, falsafah, dan konstitusi negara adalah perilaku buruk politisi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Karena itu, hemat saya, untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap politik, hukum, falsafah, dan konstitusi negara dibutuhkan perilaku baik politisi dalam politik dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada konteks ini dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media Massa, Organisasi Masyarakat, Budayawan, Negara-wan, Cendekiawan, dan para Agamawan. Upaya praktis yang harus dilakukan masyarakat sipil untuk mewujudkan perilaku baik politisi diantaranya menyadarkan masyarakat untuk memberikan sanksi politik kepada politisi.

### **Perlu sanksi politik politisi**

Sanksi politik bagi politisi adalah memberikan hukuman kepada politisi korup, politisi yang tidak berpihak kepada rakyat, dan politisi yang tidak memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dengan cara tidak memilihnya kembali untuk menjadi pemimpin bangsa. Masyarakat sipil harus menyadarkan masyarakat untuk tidak memilih politisi busuk dengan cara membangun pemahaman politik masyarakat melalui sosialisasi dan publikasi. Upaya Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan politisi-politisi busuk dipandang sebagai langkah tepat dalam menyadarkan masyarakat dalam memilih politisi sebagai pemimpin bangsa. Selain menyadarkan masyarakat, upaya ICW itu dapat membuat malu politisi untuk tampil dalam politik.

Upaya sosialisasi dan publikasi seperti ini harus didukung oleh semua pihak terutama masyarakat sipil yang disebutkan di atas. Media massa harus mendukung upaya sosialisasi dan publikasi

dengan cara obyektif, kritis, dan profesional. Ormas harus memiliki program kerja yang mengarah pada penyadaran politik masyarakat. Para akademisi harus lebih giat melakukan kajian dan penelitian untuk membangun pemahaman politik masyarakat yang utuh dan rasional. Tokoh-tokoh agama harus mengarahkan pembicaraan keagamaan pada konteks dinamika politik kekinian terutama terkait dengan perilaku dan sikap politisi.

Okezone.com, 12 Juli 2013

## DEMOKRASI ANTARA POPULARITAS DAN KUALITAS

**K**alangan artis tampaknya akan kembali mewarnai pada pelaksanaan pemilu 2014 mendatang. Betapa tidak, berdasar daftar calon anggota legislatif sementara, hampir seluruh partai peserta pemilu mengajukan calon legislatif dari kalangan artis. Puluhan nama artis tercatat sebagai calon anggota legislatif dari berbagai parpol, sebut saja PAN, Partai Golkar, PDIP, Partai Hanura dan tidak ketinggalan Partai Nasdem, meskipun baru kali pertama sebagai peserta pemilu Partai Nasdem tampaknya tidak ingin ketinggalan untuk mengusung artis sebagai calon legislatifnya, serta parpol yang lain. Publikpun beraksi beragam, sebagian mengamini dan menilai sah-sah saja pencalonan dari kalangan artis, mengingat pencalonan anggota legislatif adalah hak semua warga sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara sebagian lain memandang sinis, karena pencalonan artis dinilai hanya karena popularitasnya untuk mendulang suara tanpa mepedulikan kompetensi yang dimiliki.

Saat ini jumlah artis di DPR sebenarnya relatif sedikit yakni 16 orang dari total 560 anggota. Namun betatapun sedikit jumlah mereka, seakan mereka tidak pernah sepi dari sorotan publik. Publik seolah bertanya apa yang bisa dikerjakan oleh artis untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di DPR. Penilaian semacam ini tentu tidak adil, karena banyak pula anggota legislatif dari kalangan bukan artis yang tidak produktif di DPR, bahkan seringkali mangkir dalam berbagai kesempatan sidang dewan. Bahkan menurut hasil riset sebagaimana dikemukakan Nurul Arifin anggota DPR dari kalangan artis bahwa 25% anggota DPR dari kalangan artis memiliki kinerja bagus. Namun label bahwa artis hanya mengandalkan popularitas tidak dapat dihindari. Bagaimana melepaskan label keartisan tersebut yang pencalonannya seolah hanya menuju demokrasi popularitas.

### **Pendewaan Popularitas**

Diakui atau tidak modal popularitas yang dimiliki para artis merupakan modal politik yang patut diperhitungkan. Setidaknya dengan kepopuleran mereka, para artis tidak perlu menguras energi berlebih untuk mensosialisasikan dirinya kepada publik. Kondisi semacam ini tampaknya sangat disadari oleh parpol. Oleh karena itu, partai politik pragmatis tidak perlu berpikir panjang untuk merekrut artis sebagai calon legislatif. Tanpa bermaksud menafikan niat baik partai politik dalam menseleksi kadernya, saya menangkap ruh bahwa motivasi paling dominan parpol merekrut artis sebagai caleg adalah untuk mendulang suara. Jika dicermati masing-masing parpol tentu mengemukakan bahwa artis yang diusung telah diseleksi oleh partai. Sebut saja PDIP mengemukakan bahwa caleg dari kalangan artis telah terlibat di partai mulai dari simpatisan sampai menjadi fungsionaris. Demikian pula PAN yang akan membekali calegnya melalui sekolah politik, demikian pula parpol lainnya. Namun demikian minirnya pandangan publik terhadap segala yang dilakukan partai acapkali tak terelakkan.

Untuk merubah minirnya pandangan publik terhadap pencalonan artis sebagai anggota legislatif setidaknya diperlukan beberapa hal sbb: pertama, kualitas parpol, menurut hemat saya parpol berkualitas adalah parpol yang established menjalankan setiap fungsi yang diembannya dan berkarakter secara ideologis.

Dia bukan partai yang hanya hiruk pikuk menjelang pelaksanaan pemilu. Adalah sebuah kewajaran jika parpol ingin memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan, karena memang itulah tujuan parpol didirikan. Ketika parpol telah established kekuasaan akan datang kepadanya bukan sebaliknya. Faktanya parpol saat ini cenderung berfikir pragmatis. Menurut hemat saya, saat ini tidak kita temukan partai ideologis. Boleh dikatakan hampir seluruh partai yang ada merupakan partai pragmatis, dan kurang berkarakter. Publik hampir tidak bisa lagi mengaktegorikan mana partai Islam, non Islam, ataupun nasionalis, semuanya memiliki wajah yang sama.

Kedua, kualitas tata kelola parpol, yakni bagaimana parpol mengelola dan membiayai dirinya. Asumsi saya, mengapa parpol menggandeng artis dalam pencalonan caleg adalah disamping popularitasnya juga karena artis memiliki dana yang relatif memadai. Parpol harus memiliki sumber yang mandiri dan dapat dipertanggung jawabkan. Ketika parpol disibukkan persoalan dana, dan melupakan substansi untuk menjalankan fungsinya maka yang terjadi adalah politik transaksional. Oleh karena itu tidak mengherankan jika para pemilik modal yang dapat "membeli" parpol, pada gilirannya dia hanya akan "duduk manis" di dewan ketika terpilih tanpa peduli apakah kinerjanya di dewan produktif atau tidak, tidak peduli pula apakah dirinya benar-benar mewakili rakyat atau sekedar tercatat namanya di dewan. Terlebih jika partai telah "terbeli" oleh "*strongman*" untuk dibiayai pencalonan orang-orangnya untuk berkuasa, dapat dibayangkan bagaimana di kemudian hari partai/pejabat politik terpilih harus "membalas budi". Pada gilirannya pejabat politik terpilih acapkali tidak bisa netral dalam menentukan kebijakan publik. Pilihan kebijakan publik tidak lagi untuk publik tetapi lebih berorientasi pada pemodal.

Ketiga, kader partai *brilliant*, menurut saya tidak sulit bagi parpol yang telah established untuk merekrut kader *brilliant*. Di sisi lain parpol berkewajiban untuk mencetak kader-kadernya menjadi kader brilliant bukan karbitan. Kader yang demikian akan menjaga kemurnian perjuangan partai yang pada gilirannya adalah memperjuangkan rakyat. Untuk mewujudkan kader *brilliant* semacam ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Menurut saya tidak ada yang tidak mungkin, senyampang ada komitmen bersama kader dan parpol untuk membangun kader *brilliant*, hal ini tentu

akan dapat terwujud. Jika ketiga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik saya yakin tidak ada lagi pendewaan terhadap popularitas caleg.

### **Pendidikan Politik sebuah Keniscayaan**

Membangun demokrasi substansial menurut saya diawali dari hulu yakni partai politik. Melalui parpol yang *established* akan terpilih pemimpin politik dan wakil-wakil rakyat yang dapat diandalkan dalam mengemban amanah rakyat. Ketika input partai politik berkualitas, dan parpol secara berkesinambungan menyelenggarakan pendidikan politik akan terwujud tata kelola partai yang *established* pula. Pada bagian hulu inilah menurut hemat saya sebagai penentu parpol macam apa yang akan terbangun. Kegagalan partai dalam menyelenggarakan pendidikan politik di bagian hulu pada gilirannya akan merembet ke bagian tengah tata kelola partai dan pada gilirannya akan berdampak pada patalogi partai, di bagian hilir seperti politik uang, korupsi, dan tidak berjalannya fungsi partai.

Apalagi jika patologi parpol mulai hulu hingga hilir, betapa sulit untuk menyembuhkannya. Oleh karena itu penyadaran politik melalui pendidikan politik dari hulu hingga hilir, terhadap setiap stakeholder adalah sebuah keniscayaan. Akhirnya kita semua berharap semoga demokrasi di negeri ini adalah *the real democracy*, demokrasi berkualitas prima bukan sekedar demokrasi popularitas.

Harian Bhirawa, 20 Desember 2013



## NIRMORAL DAN INTEGRITAS PEJABAT NEGARA

**L**ebih dari satu pekan berita mencengangkan tentang Akil Mochtar yang tertangkap dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih saja menghiasi berbagai media massa. Bahkan kasusnya merembet pada pejabat negara lain, sebut saja Atut, Gubernur Banten. Pada awal pemberitaan tertangkapnya Akil Mochtar, publikpun beraksi sangat keras bahkan Jimly Asshiddiqie mantan ketua MK mengeluarkan pernyataan yang sangat keras yakni “kalau sudah OTT begitu, dia berarti juga terbukti melakukan. Menurut saya, pantasnya orang ini di hukum mati” (Jawa Pos, 4/10).

Tak pelak pernyataan tersebut direspon beragam, sebagian mengamini mengingat MK sebagai benteng terakhir penegak hukum akhirnya harus runtuh dengan kasus korupsi. Sementara sebagaian publik yang lain mempertanyakan tentang dasar hukum hukuman mati yang tidak ada di Indonesia. Hukum-an apa yang tepat untuk Akil Mukhtar biarlah proses hukum yang akan menjawabnya.

Hal yang perlu direnungkan adalah mengapa pejabat negara kita seolah nirmoral dan integritas. Saya meyakini “ada yang salah” dalam proses pemilihan pejabat negara. Kasus Akil Mochtar hanya merupakan salah satu kasus dari sedertan kasus yang melibatkan pejabat negara. Meskipun diakui kasus Akil Mochtar ini merupakan yang sangat fenomenal. Betapa tidak, kasus Akil Mochtar ini melibatkan semua pihak yang seolah mewakili institusi yang ada di negeri ini mulai dari lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan dunia usaha.

Lengkap sudah rasanya musibah di negeri tercinta ini sebagaimana ungkapan yang pernah disampaikan Syafi'i Ma'arif mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam berbagai kesempatan “negeri ini nyaris sempurna kerusakannya”. Kemanakah hati nurani, moral dan rasa malu para pejabat negara pelaku tindak korupsi. Andai saja korupsi dinilai tidak merupakan perbuatan dosa, memakan yang bukan haknya benar-benar merupakan tindakan tidak bermoral.

Apalagi tuntunan agama Islam yang jelas-jelas menyebutkan “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagaimana harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al Baqoroh: 188)

Tidakkah para pejabat negara pelaku korupsi tidak menghiraukan ayat ini? Ataukah mereka tidak tahu/mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Kita benar-benar telah dibuat miris atas perilaku pejabat negara yang seolah telah kehilangan moral dan integritasnya. Sementara keduanya merupakan kunci penyelenggara negara yang amanah. Jabatan dan kekuasaan seolah telah membutakan mata dan hati untuk dapat membedakan mana yang hak dan bathil serta halal dan haram.

### **Peradaban rakyat dan pejabat negara**

Adakah yang salah dari negeri ini, hingga melahirkan pejabat negara sarat korupsi. Setidaknya ada 2 (dua) perspektif untuk menjelaskannya. Pertama, dari perpektif kultur dan kedua, struktur. Secara kultur, pejabat negara tidak dapat dipisahkan dari kultur rakyat dan bangsa ini. Meminjam pernyataan Salim Said,

guru besar Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang menyatakan bahwa "peradaban rakyat menentukan peradaban pemimpin". Saya kira pernyataan ini tidak berlebihan dan dapat dipahami mengingat pada hekekatnya pemimpin adalah representasi dari rakyat. Dengan kata lain, jika peradaban rakyat rendah maka akan menghasilkan peradaban pemimpin yang rendah pula.

Betapa tidak, ketika rakyat berada dalam kondisi yang serba kekurangan, jauh dari hidup berkecukupan dan sejahtera, mereka akan sulit menolak jika ada calon pejabat politik/publik yang memberikan iming-iming uang atau dalam bentuk lain agar memilihnya. Pada gilirannya ketika calon pejabat politik/publik terpilih maka dia akan mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk kemudian mereka berusaha memperolehnya kembali meski harus dengan korupsi.

Rakyat yang cerdas (*smart citizen*), tentu tidak akan mengadaikan diri dengan memilih pemimpin tidak bermoral dan berintegritas. *Smart Citizen* akan dapat memahami dengan baik bahwa setiap suara akan menentukan pilihan kebijakan publik. Sudahkah rakyat kita dapat dikategorikan sebagai *smart citizen*, sementara suara mereka masih bisa dibeli? Fenomena semacam ini, menurut hemat saya tidak saja terjadi pada penentuan pejabat politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi juga tidak menutup kemungkinan pada pemilihan pejabat negara yang dipilih oleh lembaga yang mewakili rakyat.

### **Kekuatan supra struktur**

Tanpa bermaksud menyalahkan sistem, sistem politik atau supra struktur yang kuat pasti akan melahirkan pejabat negara yang bermoral dan memiliki integritas tinggi. Tidak ada tempat bagi pejabat negara korup dalam sistem politik yang kuat. Dalam supra struktur yang kuat penegakan hukum terjamin, tanpa pandang bulu dan terbang pilih serta didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara negara penuh moral dan integritas.

Saya meyakini sistem yang bersih tidak akan memberikan peluang bagi proses terpilihnya pejabat negara yang sarat korupsi. Karena sejak awal masukan sistem telah menyaring calon pejabat negara dengan sangat selektif. Maka ketika terdapat pejabat

negeri ini yang korup, dapat dipastikan ada yang "bocor" dalam proses penyinggannya.

Belum lagi ketika pemilihan pejabat negara diwarnai dengan politisasi, maka politik transaksional tidak mungkin tidak pasti akan terjadi. Jika hal demikian yang terjadi, maka pada gilirannya akan terlahir kebijakan-kebijakan publik yang benar-benar tidak berpihak pada publik. Saya tidak habis pikir dimana letak keadilan atas keputusan yang dihasilkan oleh pejabat korup. Hukum benar-benar telah terbeli, kekuasaan telah benar-benar menjadi leviathan yang rakus menelan apa saja yang ada dihadapannya.

Benar rupanya apa yang dikatakan Lord Acton dengan dalilnya "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*", Kekuasaan cenderung untuk korupsi, kekuasaan yang absolute menciptakan korupsi yang absolute juga. Akankah dalil ini terbukti selamanya di Indonesia. Tidak mungkin kita keluar dari carut marut korupsi yang dilakukan oleh pejabat negeri ini?

### **Kekuasaan sebagai amanah**

Saya optimis kita bangsa Indonesia bisa keluar dari persoalan bangsa ini jika para pejabat negara memposisikan kekuasaan yang diemban adalah sebagai amanah. Kekuasaan yang disandang para pejabat negara bukan untuk kekuasaan itu sendiri, bukan pula untuk kroni, dan bukan sebagai sumber mata pencaharian. Kekuasaan yang merupakan sinergi tiga kekuatan yakni *forces* (kekuatan), *influences* (pengaruh), dan *authorities* (otoritas atau kewenangan), harus benar-benar diposisikan pada porsinya. Kekuasaan sudah saatnya diposisikan sebagai alat untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sehingga dengan kekuasaan ditangan para pejabat yang amanah akan terwujud masyarakat madani, penuh keadilan dan kesejahteraan. Semoga Indonesia kedepan akan dipimpin oleh para penyelenggara negara yang amanah, memiliki moral dan integritas yang tinggi.

Harian Bhirawa, 01 Juni 2013

## PANCASILA DI TENGAH PROBLEMATIKA BANGSA

Sejatinya pemerintah dan masyarakat Indonesia semakin matang menjadikan Pancasila sebagai falsafah, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum. Indonesia telah mencapai umur 68 tahun, artinya pemerintah dan masyarakat Indonesia telah melalui proses panjang dalam berbangsa dan bernegara. Dengan proses panjang tersebut diharapkan pemerintah dan masyarakat telah memahami hakikat dan menjiwai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Harapan tersebut tidak kunjung tampak dalam kehidupan nyata, justru sebaliknya pemerintah dan masyarakat semakin mengabaikan dan bahkan lupa dengan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

Bentuk nyata hilangnya Pancasila sebagai landasan bangsa dan negara adalah mencuaknya berbagai problematika bangsa seperti menguatnya gerakan separatisme, menguatnya intoleransi antara umat beragama, tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran, dan rendahnya indeks pembangunan manusia. Pancasila telah dilupakan, diabaikan, dan tidak lagi dianggap sebagai falsafah bangsa. Padahal lahirnya Pancasila melalui kerja keras *founding fathers*. Lima sila yang ada di dalamnya diletakkan dengan penuh kehati-hatian agar searah dengan corak kehidupan bangsa serta dapat menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bangsa Indonesia seutuhnya.

Masyarakat tidak boleh lupa dengan sejarah. Lupa akan sejarah adalah bentuk dari penghianatan terhadap pejuang-pejuang bangsa yang susah payah membentuk dan mempersatukan masyarakat dalam satu bangsa. Tanggal 1 Juni adalah momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memikirkan dan mengingat kembali sejarah-sejarah bangsa termasuk sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila adalah ideologi bangsa yang dilahirkan melalui proses perdebatan intelektual, kritis, rasional, dan ilmiah antara tokoh-tokoh penting (*founding fathers*) bangsa terutama Soekarno, Muhammad Yamin, Soepomo.

*Founding fathers* bangsa mencurahkan segala fikiran dan tenaga untuk merumuskan ideologi bangsa dengan tepat yang dapat mempersatukan pulau-pulau nusantara, bahasa, budaya, dan suku yang berbeda-beda untuk berada dalam satu organisasi negara bangsa. Tanggal 1 Juni 1945, gagasan dan ide *founding father* berhasil dirumuskan dan disatupadukan yang kemudian dikenal Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.

Memikirkan dan mengingat akan Pancasila bukan bermakna bagaimana elemen bangsa memahami lahirnya Pancasila namun memiliki makna yang jauh dari itu yaitu bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini. Apakah semua elemen bangsa telah menjiwainya atau justru sebaliknya. Ajaran Pancasila memiliki makna yang sangat agung dan terhormat karena didalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Pancasila mengajarkan segenap warga negara untuk bertuhan, bermoral, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti. Manusia harus membangun hubungan yang saling memanusiakan, memuliakan,

menghormati antara satu dengan yang lain, mengedepankan kebersamaan untuk kebaikan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Didalam Pancasila tidak terdapat celah untuk tidak berbuat baik. Namun seperti yang dijelaskan diawal tulisan ini, Pancasila telah dilupakan, diabaikan, dan bahkan dianggap sebagai ideologi yang tidak lagi tepat sebagai pedoman bangsa dan negara. Jejak pendapat Kompas tahun 2008, 2011, dan tahun 2012 menunjukkan Pancasila tidak lagi dipercaya sebagai ideologi bangsa dan negara.

Ada banyak faktor yang membuat masyarakat lupa akan Pancasila salah satunya adalah tidak adanya pemimpin politik dan pemerintahan sebagai panutan dan teladan yang benar-benar menjiwai Pancasila. Di awal-awal kemerdekaan, Indonesia masih memiliki kepemimpinan politik yang menjiwai Pancasila namun di era sekarang ini sulit menjumpai kepemimpinan politik Pancasilais. Banyak elit politik yang terjebak dalam politik pragmatis. Elit politik lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan bangsa. Pancasila hanya dijadikan *lipstik services*, retorika politik dan dijadikan sebagai legitimasi formal kebijakan pragmatis. Prilaku buruk elit politik ditunjukkan melalui politik *amoral* seperti korupsi dan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan bangsa yang lebih besar.

Dampak pragmatisme politik adalah terbentuknya struktur birokrasi pemerintah yang tidak mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Fungsi birokrasi sebagai mesin untuk merealisasikan tugas dan fungsi negara tidak dapat dijalankan dengan baik terutama fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sejatinnya birokrasi menjadikan Pancasila sebagai pedoman namun lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan elit yang memperhatikan dan memposisikan birokrasi dalam struktur pemerintahan. Birokrasi bukan melayani masyarakat namun melayani elit dan dirinya sendiri. Stigma yang tertanam kuat adalah "birokrasi bukan melayani namun dilayani" dan "birokrasi ABS (asal bapak senang)". Ini-lah bentuk dari wajah birokrasi elitis.

Kepemimpinan politik pragmatis dan birokrasi elitis memicu lahirnya segudang problematika bangsa sehingga masyarakat tidak percaya dengan adanya negara termasuk Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Masyarakat sangat mudah

melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila seperti gerakan separatisme, intoleransi, memberlakukan hukum rimba, dan melakukan tindakan kriminal. Bukti nyata yang dapat kita lihat akhir-akhir ini adalah minimnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Rata-rata pelaksanaan pemilu, pileg, dan pemilukada dimenangkan oleh golput. Hal ini secara langsung menunjukkan ketidakpedulian masyarakat terhadap negara dikarenakan kekecewaannya terhadap kinerja elit politik dan pemerintah yang tidak menjiwai Pancasila dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Fenomena elit politik dan pemerintah serta masyarakat yang mengabaikan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara dipandang sebagai persoalan serius dan membahayakan eksistensi dan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apabila persoalan ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan, NKRI bubar ditelan zaman karena perilaku anak kandungnya sendiri yaitu elit politik, pemerintah, birokrasi, penegak hukum, dan masyarakat. Karena itu, diupayakan strategi dan langkah nyata semua stakeholder bangsa untuk mengatasi persoalan tersebut. Stakeholders yang paling bertanggungjawab adalah pemerintah. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya nyata untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara termasuk Pancasila. Upaya yang harus dikedepankan adalah menumbuhkan *good* dan *political will* semua *stakeholders* terutama elit politik dan birokrasi untuk membuat kebijakan-kebijakan populis yang berasaskan Pancasila dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Okezone.com, 13 Mei 2013



## DINASTI POLITIK MENGANCAM DEMOKRASI

**M**enyusul banyaknya kasus korupsi di aras lokal (pemerintahan daerah), diskusi oligarki atau dinasti politik di era otonomi daerah kembali menjadi perhatian serius. Keseriusan diskusi tersebut berujung pada langkah pemerintah melalui menteri dalam negeri untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang didalamnya mempersempit ruang gerak terjadinya oligarki atau dinasti politik di aras lokal. Pemerintah menginginkan mekanisme pemilihan kepala daerah lebih mengarah pada perwujudan substansi demokrasi yakni terwujudnya sirkulasi kepemimpinan lokal yang berkeadilan dan bermartabat.

Dinasti politik merupakan bentuk politik yang diharamkan dalam demokrasi. Karena dinasti politik akan melumpuhkan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, kebebasan berpendapat, penegakkan hukum, dan terciptanya lingkaran kekuasaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Apabila dinasti politik terus berlangsung dalam sebuah bangsa maka secara langsung menciptakan kondisi bangsa yang tidak

berkeadilan, penuh diskriminasi, dan penuh penindasan. Karena itu, dinasti politik patut disingkirkan dalam berbangsa dan bernegara.

## **Dinasti Politik dan Demokrasi**

Sejarah perlawanan terhadap dinasti politik dapat dilacak pada perdebatan pemikiran politik abad pertengahan dan abad pencerahan (*renaissance*). Pemikiran politik abad pertengahan cenderung mempertahankan keamanan kekuasaan (*status quo*) yang dikuasai oleh sekelompok orang moralis *religijs* (para agamawan). Sekelompok orang tersebut dianggap sebagai raja yang berkuasa dan berwenang sepenuhnya dalam mengatur dan mengendalikan negara. Kekuasaan politik hanya dimiliki oleh seorang raja dan para keluarganya.

Di abad pertengahan dinasti politik tumbuh subur tanpa perlawanan dari siapapun. Para pemikir dinasti politik pada abad pertengahan adalah Agustinus dan Martin Luther. Kedua pemikir tersebut berkeyakinan negara dibawah kekuasaan raja akan tercipta kehidupan damai dan sejahtera. Pada kenyataannya kehidupan masyarakat di abad pertengahan itu tidak memiliki akses kekuasaan, tidak mendapatkan hak-hak dasar, dan hidup dalam kemiskinan yang berantai (kemiskinan *absolute*).

Melihat realitas politik dinasti tersebut mengundang beberapa pemikir politik untuk membangun konsep politik yang lebih berkeadilan dan memanusiakan manusia (masyarakat). John Locke, adalah salah satu pemikir politik abad pencerahan yang tidak menginginkan politik dinasti berkuasa penuh dalam sebuah negara. Menurut John Locke politik dinasti tidak mampu memanusiakan manusia (masyarakat), justru sebaliknya yaitu merampas hak-hak dasar manusia.

Pemikiran politik John Locke menjadi landasan dasar lahirnya konsep demokrasi liberalisme yang selanjutnya dianggap sebagai sistem politik modern yang dipercayai dapat mewujudkan kehidupan negara yang berkeadilan, menghargai hak-hak dasar manusia, dan dapat menegakkan hukum dengan baik. Konsep John Locke diakui negara-negara modern termasuk Indonesia. Pasca reformasi 1998, Indonesia menempatkan demokrasi sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Bahaya Dinasti Politik

Nampaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak mampu lepas dari perilaku dinasti politik. Perilaku politik masyarakat terutama para elit politik masih kental dengan budaya politik kerajaan yang mempertahankan kekuasaan sekelompok orang (memelihara politik dinasti). Perilaku politik tersebut tidak lepas dari sejarah politik bangsa Indonesia. Indonesia sebelum merdeka terdiri dari bangsa-bangsa yang dikuasai oleh para raja-raja. Pada saat itu, para raja berkuasa penuh atas wilayah (daerah) termasuk mengatur dan mengendalikan masyarakat didalamnya. Masyarakat pada saat itu percaya penuh (baca-patuh) terhadap kepemimpinan seorang raja untuk mengatur dan mengendalikan mereka (baca-rakyat).

Tumbuhnya dinasti politik di Indonesia saat ini tidak lepas dari sejarah bangsa seperti yang diuraikan tersebut. Namun ada perbedaan mendasar antara dinasti politik sebelum Indonesia merdeka dan dinasti politik saat ini. Dinasti politik sebelum Indonesia merdeka tumbuh berdasarkan kearifan lokal (kebijaksanaan) yang diakui dan dihormati oleh semua unsur masyarakat. Dinasti politik saat ini tumbuh karena diciptakan sendiri oleh elit politik melalui upaya yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan *money politics* dalam PemiluKada, para *incumbent* memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan sebagai kepala daerah untuk menggalang massa, dan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan untuk memperkaya diri dalam rangka menghadapi PemiluKada.

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri mengidentifikasi ada 57 kepala daerah yang membangun dinasti politik di beberapa daerah di Indonesia (2013). Dari 57 kepala daerah yang mencalonkan para anggota keluarga yang memiliki pertalian darah, hanya 17 di antaranya yang kalah di arena pilkada. Selebihnya, mereka menjadi pemenang menggantikan kekuasaan keluarganya. Fenomena dinasti politik seperti ini sungguh mengancam eksistensi demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Hemat saya dinasti politik sangat berbahaya bagi demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan karena akan menciptakan: *Pertama*, mesin birokrasi pemerintahan tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam dinasti politik, birokrasi

bekerja berdasarkan "*like and dislike*" dari seorang penguasa dinasti, bukan bekerja berdasarkan tugas dan fungsi birokrasi yang sebenarnya. *Kedua*, proses politik tidak berjalan secara bebas dan adil. Proses politik berjalan sesuai kepentingan politik penguasa dinasti sehingga kebijakan politik dibuat sesuai kepentingan penguasa, bukan kepentingan publik. *Ketiga*, manajemen birokrasi (penataan kelembagaan birokrasi) dilakukan tidak mengedepankan asas profesional. Penataan birokrasi dilakukan dengan cara nepotisme yaitu siapa yang menyenangkan penguasa dinasti dia akan diperhatikan untuk menjadi pemimpin lembaga birokrasi. *Keempat*, dinasti politik memperkuat budaya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik.

Akhir dari dampak dinasti politik adalah terciptanya iklim demokrasi yang tak demokratis, buruknya pelayanan publik, kemiskinan terus menguat, pengangguran terus meningkat, dan pembangunan manusia terus merosot. Karena itu, politik dinasti dipandang sebagai bentuk politik yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinasti politik perlu disingkirkan dalam kehidupan berdemokrasi sehingga penyelenggaraan politik dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.

### **Upaya Menyingkirkan Dinasti Politik**

Seperti yang disampaikan pada awal bagian dari tulisan ini, pemerintah pusat telah mengambil langkah normatif untuk menyingkirkan dinasti politik di aras lokal dengan cara mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilukada yang didalamnya mengatur tentang minimalisasi munculnya atau terbentuknya dinasti politik dalam pemerintahan daerah. Dalam rancangan undang-undang itu pemerintah melarang istri dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada, dan melarang suami dan anak dari kepala daerah yang telah menjabat dua periode untuk mengikuti Pemilukada. Hemat saya upaya pemerintah ini merupakan langkah positif untuk mewujudkan demokratisasi pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, berkeadilan, dan menjunjung tinggi etika politik demokrasi. Langkah pemerintah ini perlu didukung oleh parlemen untuk memberikan legitimasi penuh terhadap rancangan undang-

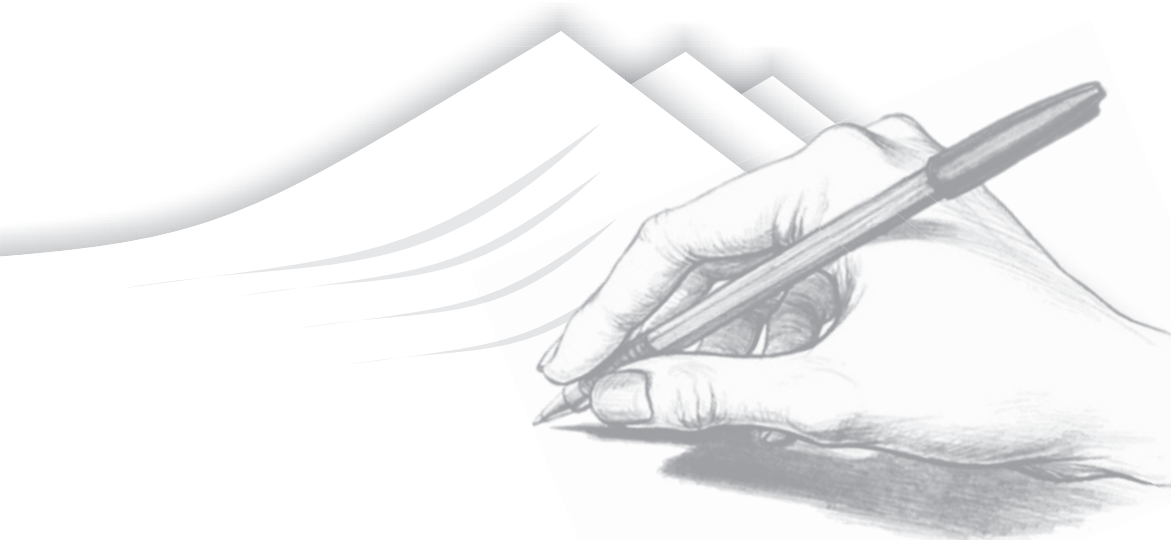
undang yang dimaksud.

Langkah pemerintah di atas juga perlu diikuti peran serta masyarakat sipil seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Perguruan Tinggi, dan Organisasi Masyarakat untuk melakukan upaya *persuasif* seperti memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar memiliki wawasan politik yang berkeadaban dalam berpolitik. Harus diakui, terciptanya dinasti politik saat ini karena didukung oleh wawasan politik masyarakat yang tak berkeadaban.

Perilaku politik masyarakat Indonesia pada umumnya masih didominasi perilaku politik pragmatis yaitu pilihan politik tidak mempertimbangkan kepentingan masa depan bangsa dan negara. Saat ini masyarakat memilih pemimpin lebih mempertimbangkan sejauh mana kemampuan ekonomi seseorang, dan memperhatikan sejauh mana kedekatan emosional (hubungan kekeluargaan), bukan sejauh mana integritas, kapabelitas, dan moralitas seseorang. Pada konteks ini dibutuhkan peran aktif masyarakat sipil untuk mewujudkan perilaku politik masyarakat yang berwawasan intelektual dan memikirkan masa depan bangsa sehingga dalam memilih pemimpin dapat mengedepankan pertimbangan integritas, kapabelitas, dan moralitas.

Diharapkan melalui upaya-upaya baik pemerintah dan masyarakat sipil seperti yang dijelaskan di atas politik dinasti dapat disingkirkan dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan daerah khususnya dan pada akhirnya demokrasi dapat diimplementasikan dengan baik dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat dalam segala aspek.

Harian Suara NTB, 01 September 2013



Bagian Kedua

# DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK



## PARTAI POLITIK MENGABAIKAN DEMOKRASI

**K**risis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin merosot. Bagi masyarakat, partai politik tidak bermanfaat positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, justru merusak tatanan hukum dan demokrasi serta menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan. Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis 53,9% masyarakat mengaku tidak percaya terhadap integritas partai politik. Krisis kepercayaan ini dilatarbelakangi adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi, kader partai tidak berpihak kepada rakyat dan melakukan tindakan amoral seperti skandal seks.

Kinerja buruk kader partai ini membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi. Sejatinya kader partai politik harus mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat (DPRD, DPD,



DPR RI, Kepala Daerah). Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik. Pada praktiknya seperti hasil survei LSN di atas, partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.

Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, misalnya, adalah cermin dari sikap kader partai politik yang tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan. Mestinya, kader partai politik terutama DPR RI harus menolak kebijakan tersebut karena mayoritas masyarakat kecil terutama nelayan, petani, dan buruh tidak menginginkan adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun kader partai politik yang duduk di kursi DPR RI tidak menghiraukan suara rakyat, justru mayoritas DPR RI merasionalisasikan kenaikan harga BBM bersubsidi.

### **Politik dinasti Partai Politik**

Permasalahan lain partai politik adalah kesenangannya mempertahankan politik dinasti. Kendati partai politik menjadikan demokrasi sebagai asas dan ideologi politik, namun dalam praktiknya mereka tidak bisa lepas dari politik dinasti. Partai politik dikelola secara kekeluargaan. Struktur dan kepengurusan didominasi satu keluarga. Kader-kader terbaik bangsa tidak diberikan kesempatan oleh keluarga tertentu untuk mengatur dan mengelola partai politik. Dampak dari dinasti politik partai politik ini adalah terbentuknya struktur negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga tertentu, terciptanya diskriminasi politik dalam berbangsa dan bernegara, dan menguatnya budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bentuk politik seperti inilah membuat bangsa dan negara semakin terbelakang, termiskinkan, dan memicu lahirnya sejuta persoalan seperti tindakan teroris serta tindakan kekerasan sosial politik.

Bentuk dinasti politik partai politik semakin diperparah lagi dengan adanya pola pikir elit partai baik di pusat maupun

di daerah bagai pola pikir pedagang. Pola pikir elit partai bagai pedagang tersebut dikenal sebagai politik dagang sapi. Politik dagang sapi adalah elit partai menjual partai politik kepada politisi-politisi sebagai kendaraan politik dalam meraih kekuasaan politik seperti DPRD, DPR RI, dan Kepala Daerah. Sebaliknya, para politisi mendekati elit partai untuk menawarkan dengan berbagai tingkatan harga.

Masa politik dagang sapi seperti ini adalah pada saat penyelenggaraan pemilihan umum seperti Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif seperti yang berlangsung di tahun 2013 dan 2014. Pada musim ini dagangan elit partai cukup laku bahkan diperebtukan politisi dengan berbagai kisaran harga. Biasanya harga tergantung sejauhmana kekuatan politik partai politik. Semakin besar kekuatan politik partai politik maka semakin besar harga yang harus dibayar politisi. Karena itu, acapkali partai politik mengusung dan mendukung politisi yang tidak searah dengan ideologi partai. Elit partai tidak memperhatikan ideologi politisi namun melihat seberapa besar modal uang yang dimiliki politisi. Dampak dari politisi dagang sapi ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki integritas dan kapabelitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional.

### **Upaya perbaikan Partai Politik**

Sudah saatnya elit dan kader partai politik menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam membangun bangsa dan negara yaitu salah satunya menempatkan partai politik sebagai institusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat didalam proses politik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Menurut Michael G. Roskin (1997:202) partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga negara dan *responsivitas* pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Artinya elit dan kader partai harus menjadi pejuang aspirasi rakyat. Kemampuan partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik dalam institusi pemerintahan.

Menurut Firmanzah (2008:295) partai dapat dipercaya rakyat

adalah partai yang mampu berinteraksi dengan rakyat secara intensif. Dengan interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui proses interaksi, pesan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan akan dapat ditangkap oleh partai politik. Realitas sosial hanya dapat dimengerti dan dipahami melalui proses interaksi.

Pemahaman realitas sosial tidak dapat dilakukan dalam ruang-ruang diskusi di tingkat elit dan di internal partai politik. Kemampuan partai politik memecahkan permasalahan rakyat secara langsung meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keberadaan elit dan kader partai politik. Karena itu, para elit dan kader partai harus berupaya berinteraksi dengan rakyat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis.

Selain perbaikan seperti di atas, hemat saya untuk mewujudkan partai politik pejuang aspirasi rakyat dibutuhkan perbaikan manajemen (pengelolaan) partai yang mengedepankan asas-asas demokrasi pada konteks kaderisasi dan penataan sumber keuangan partai politik. Kedua hal ini sangat penting untuk diperbaiki guna mewujudkan eksistensi partai politik sebagai pejuang aspirasi rakyat. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi didalam berpolitik dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai politisi. Penataan sumber keuangan yang baik memperkuat idealisme partai politik didalam mengusung dan mendukung kader-kader terbaik dalam berpolitik untuk bangsa dan negara.

Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Karena itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik semakin mantap sebagai pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Harian Suara NTB, 22 Desember 2013

## BERHARAP KINERJA BAIK PARTAI POLITIK

**B**erdasarkan hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) masyarakat masih menganggap partai politik tidak memiliki kinerja baik. Terdapat 47,2 persen masyarakat mengatakan ketidakpuasan terhadap kinerja partai politik (kompas,26/3). Skeptisasi masyarakat terhadap partai politik bukan tanpa alasan. Masyarakat tidak merasakan kontribusi partai dalam pembangunan segala aspek pembangunan, justru sebaliknya masyarakat dapat melihat secara nyata partai politik tidak sedikit anggotanya di parlemen melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi. Karena itu, masyarakat secara langsung dapat dipahami kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai organ masyarakat sipil untuk mewujudkan pembangunan bangsa menjadi lebih baik. Tidak sedikit masyarakat menganggap partai politik bagai gerombolan sesaat, "muncul pada momen pemilu, pileg, dan pilkada, setelah itu hilang membawa janji-janji manis yang pernah disampaikan kepada rakyat".

Mengingat partai politik sebagai sarana formal dalam melakukan rekrutmen politik, maka keberdaannya menjadi sangat penting dalam menentukan *performance* pemerintahan. Di tahun 2013 dan 2014 ini, publik berharap adanya kemauan baik partai politik untuk mengusung kader-kader terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin pemerintahan di legislatif dan eksekutif. Hemat penulis, terdapat tiga variabel utama yang mempengaruhi partai politik dalam menentukan sikap untuk memilih kader sebagai calon pemimpin di legislatif dan eksekutif, yaitu kemampuan partai secara finansial, kematangan ideologi partai yang dimiliki, dan idealisme partai sebagai pelopor perubahan.

Kemampuan finansial organisasi menentukan sikap partai politik dalam memilih kader lebih profesional yaitu tidak tergantung pada kemampuan finansial para calon namun mengedepankan elektabilitas karena kemampuan profesional dan pengalaman calon dalam dunia politik yang secara nyata banyak memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat. Berbeda dengan yang tidak memiliki kemampuan finansial, partai politik akan mendukung dan mengusung calon yang memiliki kemampuan finansial meskipun tidak memiliki kemampuan profesional dan pengalaman positif dalam dunia politik. Dampak dari sikap partai tersebut adalah lahirnya pemimpin politik dan pemerintahan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga rawan terjadinya tindakan menyimpang seperti penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Kematangan ideologi organisasi memberi pengaruh besar partai politik dalam menentukan sikap politik. Bagi partai politik yang memiliki kematangan ideologi akan selektif dalam memilih para calon. Dalam memilih calon, partai politik mengedepankan sistem dan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki. Calon yang dipilih adalah yang memenuhi syarat sesuai aturan negara dan sesuai aturan partai. Partai politik akan memilih calon yang secara historis keorganisasian memiliki sejarah yang sama dengan partai politik, memiliki riwayat organisasi searah dengan partai politik, dan memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama dalam berpolitik dan bernegara. Berbeda halnya dengan partai politik tidak memiliki kematangan ideologi, partai politik seperti ini akan memilih calon secara gampang (kondisional)

sehingga berdampak pada polarisasi ideologi dalam partai politik, koalisi rentan konflik, dan tidak memiliki kekuatan kolektif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Partai politik yang memiliki kemampuan idealisme sebagai pelopor perubahan akan hati-hati memilih calon pemimpin di legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan cita-cita dasar partai politik. Tidak gampang bagi partai beridealisme untuk memilih calon yang memiliki idealis tinggi dalam berjuang untuk partai politik. Karena itu, untuk menentukan calon harus melalui proses kaderisasi secara sistematis dan masif dalam jangka waktu yang lama. Partai politik harus melakukan *doktrinasi* terhadap kader untuk menanamkan cita-cita politik partai politik. Kader harus melalui tahap-tahap sesuai sistem kaderisasi partai. Kader yang mampu melalui tahap kaderisasi secara baik dan dibuktikan dengan pemahaman yang utuh terhadap cita-cita partai akan dipertimbangkan untuk menjadi calon pemimpin.

Partai politik yang beridealisme dalam politik termasuk menentukan kader sebagai pemimpin di legislatif dan eksekutif akan memberi pengaruh positif yaitu lahirnya pemimpin yang berjiwa konsistensi dalam menjalankan fungsi *artikulasi* dan *agregasi* politik di legislatif dan eksekutif. Sebaliknya, partai politik tanpa idealisme rawan melahirkan pemimpin *inkonsistensi* dalam memperjuangkan cita-cita partai dan aspirasi rakyat, justru mengedepankan pragmatisme dan transaksional politik yang menguntungkan secara pribadi.

Di Indonesia sulit dijumpai partai politik yang memiliki kemampuan finansial, memiliki kematangan ideologi, dan beridealisme dalam politik. Publik secara langsung dapat melihat, tingginya ketergantungan partai politik terhadap pemodal terutama kepada pelaku usaha sebagai penopang finansial partai politik dalam meraih kemenangan politik baik di Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Sehingga tidak heran, partai-partai di Indonesia terdapat pengusaha-pengusaha besar di tiap level struktur partai, dari pusat hingga daerah. Seolah partai politik tidak dapat eksis tanpa pengusaha. Partai politik yang bergantung kepada pengusaha tidak mencirikan organisasi masyarakat sipil (*civil society*) yang sebenarnya.

Partai-partai di Indonesia dinilai rapuh dalam berideologi, hal ini tampak dari pola koalisi antara partai politik. Banyak partai

politik yang berkoalisi tanpa memperhatikan ideologi. Di tingkat pusat, partai A berkoalisi dengan partai B, namun ditingkat daerah partai A berposisi dengan partai B, justru partai A berkoalisi dengan partai C yang ditingkat pusat menjadi oposisi partai A. Koalisi yang tidak berpola menunjukkan kerapuhan ideologi partai politik. Di Indonesia partai yang beridealisme dalam politik sulit dijumpai terutama dalam menentukan calon pemimpin legislatif dan eksekutif.

Kenapa partai politik di Indonesia tidak memiliki kemampuan finansial, berideologi, dan beridealisme dalam politik. Partai politik tidak memiliki kemampuan finansial dipengaruhi buruknya tata kelola (manajemen) organisasi partai politik dalam memperkuat sumber keuangan partai. Sulit dijumpai partai politik yang memiliki usaha mandiri sebagai sumber keuangan partai. Partai politik hanya sibuk memperbanyak organisasi sayap sebagai alat dan penopang untuk meraih kekuasaan. Partai politik tidak berideologi dan tidak beridealisme dalam politik dipengaruhi pragmatisme partai politik dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan harus mengikuti irama dan kondisi politik yang ada, bukan ideologi dan cita-cita partai politik.

Partai politik yang tergantung pada pemodal, dan tergantung pada irama dan kondisi politik dipercayai akan mendapatkan peluang besar untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, namun tidak bermakna positif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sudah saatnya partai politik sadar akan tugas dan fungsinya sebagai pelopor perubahan bangsa menuju yang lebih baik (masyarakat sejahtera). Karena itu, partai politik harus: (1) memperbaiki tata kelola (manajemen) keuangan sebagai penopang berjalannya roda organisasi partai sehingga tidak bergantung pada para calon yang hanya mengandalkan duit, (2) melakukan penguatan ideologi dengan mengusung calon pemimpin sesuai sistem dan aturan partai, dan membangun koalisi yang berpola dari tingkat pusat hingga di daerah, dan (3) memperkuat idealisme dengan mendukung dan mengusung kader partai yang berkualitas dan konsisten sebagai calon pemimpin legislatif dan eksekutif untuk memperjuangkan cita-cita partai sesuai aspirasi rakyat.

Harian Suara NTB, 02 Maret 2013

## EKSPLOITASI KEMISKINAN DALAM PEMILU

**D**i tahun Pemilihan Umum (Pemilu) ini beragam cara dilakukan politisi untuk meraih simpati rakyat terutama membangun citra diri seperti pemasangan iklan di media massa, baliho, spanduk, dan blusukan dadakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Politisi dalam setiap bentuk pencitraan tidak lepas dari isu kerakyatan seperti kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan sumber daya manusia.

Politisi menjadikan isu kemiskinan sebagai isu penting membangun citra diri untuk meraih simpati rakyat. Iklan politik di media massa, misalnya, selalu menampilkan kondisi kemiskinan, ketidakberdayaan masyarakat, dan segala hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk diperbaiki manakala menjadi pemimpin. Dari berbagai isu tersebut politisi menawarkan berbagai solusi alternatif untuk membawa dan mewujudkan kehidupan masyarakat tanpa kemiskinan, tanpa ketidakberdayaan, dan menjadi masyarakat yang lebih baik dalam kehidupan.



## Politisi dan Isu Kemiskinan

Politisi seolah berkeyakinan kuat isu kemiskinan mampu meraih simpati rakyat untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Keyakinan politisi tentang hal ini tentunya berangkat dari sejarah-sejarah perubahan politik dan kekuasaan diberbagai negara. Dalam sejarah dunia, isu kemiskinan menjadi penting diangkat dalam perbincangan untuk menuju perubahan. Isu kemiskinan bagaikan bom, jika dipanaskan akan meledak menghancurkan segala hal yang ada disekitarnya.

Isu kemiskinan jika terus diperbincangkan akan menjadi kekuatan gerakan untuk menuju perubahan. Banyak contoh sejarah yang menunjukkan isu kemiskinan mampu menuju perubahan. Revolusi Rusia, misalnya, melalui isu kemiskinan gerakan sosial dapat dibangun, organ-organ dapat dibentuk, ideologi dapat dibangun, dan basis massa dapat dipersatukan, sehingga mampu menggulingkan kekuasaan terdahulu digantikan kekuasaan yang dikehendaki.

Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari "*kontribusi*" isu kemiskinan. Masyarakat pribumi (istilah sebelum Indonesia merdeka) hidup dalam serba keterbatasan. Mereka hidup dalam lingkaran kemiskinan, akses pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak dapat dijangkau dengan mudah, kebutuhan sehari-hari seperti beras susah didapatkan, dan rumah layak huni jauh dari impian. Pemerintah Belanda maupun Jepang menjajah masyarakat pribumi tanpa sedikitpun memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan. Mereka menciptakan kehidupan masyarakat pribumi dalam keadaan kemiskinan dan keterbatasan. Disisi lain pemerintah Belanda maupun Jepang hidup dalam kemewahan. Situasi ini mendorong masyarakat pribumi bergerak maju melawan penjajahan Belanda dan Jepang menuju perubahan hingga lahirnya Indonesia merdeka, berdaulat, dan berbudaya.

Gerakan reformasi 1998, juga menjadi contoh nyata bagaimana isu kemiskinan mampu mendorong perubahan. Munculnya gerakan reformasi 1998 tidak lepas dari kondisi kemiskinan dialami sebagian besar masyarakat Indonesia pada saat itu. Goncangan ekonomi atau populer dikenal krisis moneter membuat kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kegoncangan dahsats terutama terkait dengan ekonomi. Pada saat itu, harga barang dan kebutuhan

pokok naik sedangkan daya jual produk masyarakat menurun. Situasi ini berdampak luas pada persoalan-persoalan lain seperti keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok seperti beras, aliran listrik, air bersih, dan segala kebutuhan pokok lain. Kondisi inipula menciptakan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan dengan cara melawan pemerintah Orde Baru (Orba) melalui gerakan reformasi 1998.

Mengingat isu kemiskinan sebagai alat penting untuk perubahan, maka politisi untuk meraih dan mendapatkan kekuasaan selalu menampakkan masalah kemiskinan dalam kampanye politik. Kampanye politik tanpa menyinggung persoalan kemiskinan bagaikan sayur tanpa garam. Masyarakat sangat mudah menemukan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan berbagai politisi yang ingin meraih kekuasaan sebagai Kepala Negara, Kepala Daerah, dan sebagai anggota legislatif. Politisi menawarkan berbagai bentuk dan cara penanggulangan kemiskinan sesuai kapasitas jabatan yang diincar seperti calon kepala negara dan kepala daerah selalu menawarkan program pendidikan dan kesehatan gratis, rumah layak huni, subsidi pertanian, dan membangun infrastruktur sebagai penopang kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik.

Strategi politik politisi menjadikan isu kemiskinan sebagai isu penting dalam meraih kekuasaan dinilai sebagai hal wajar dalam dunia politik praktis khususnya. Menurut Antonio Gramsci "siapa pun yang ingin berkuasa harus mampu menjadikan isu kerakyatan termasuk masalah kemiskinan sebagai tujuan gerakan politik untuk mendapatkan kekuasaan". Menurut Gramsci tanpa isu kerakyatan politisi sulit mendapatkan dukungan untuk meraih kekuasaan. Sejalan dengan pendapat Gramsci, Firmanza sebagaimana dalam bukunya "Marketing Politik" menjelaskan politisi dalam meraih kekuasaan harus mampu membaca dan menjadikan kepentingan dan kebutuhan pasar (masyarakat) sebagai landasan berpolitik. Politisi yang tidak mampu membaca dan menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai landasan politik, adalah awal dari kegagalan politisi dalam meraih kekuasaan termasuk mempertahankan kekuasaan.

## Politisi Eksploitasi Kemiskinan

Pada praktiknya tawaran-tawaran emas politisi untuk penanggulangan kemiskinan selalu berujung pada kekecewaan dan bahkan menyakitkan masyarakat. Manakala politisi berhasil meraih dan mendapatkan kekuasaan selalu saja tawaran atau janji politik yang pernah disampaikan tidak dapat dibuktikan dan dipenuhi dengan baik. Masyarakat seolah ditempatkan sebagai boneka mainan politisi yang gampang ditinggalkan begitu saja. Dari pemilu ke pemilu persoalan kemiskinan tidak pernah dapat diselesaikan dengan baik, justru masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran semakin menguat dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya, isu kemiskinan hanya dijadikan sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata dan menjadi obyek eksploitasi oleh politisi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37%. Angka kemiskinan ini tentu melebihi target yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2013 dimana angka kemiskinan ditetapkan sebesar 10,5%. Berdasarkan data BPS bulan Februari 2013 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,17 juta orang atau 5,92%, dimana Pemerintah menargetkan sebesar 5,5 - 5,8% di akhir tahun 2013. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 1 diantara 9 orang Indonesia adalah rakyat miskin dan 1 diantara 17 orang Indonesia adalah pengangguran (Hentje Pongoh, 2013).

Data kemiskinan ini menunjukkan salah satu bentuk nyata kebohongan politisi dalam politik. Eksploitasi kemiskinan ini terus berlanjut hingga politisi menjabat sebagai pejabat pemerintahan. Pasalnya mereka menjadikan isu kemiskinan sebagai dasar penyusunan program pembangunan termasuk penyusunan kebijakan anggaran (APBN/D) namun implementasi dari kebijakan anggaran nyaris tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Acapkali implementasi kebijakan kerakyatan seperti Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat tidak tepat sasaran sehingga kemiskinan di tengah kehidupan masyarakat semakin sistemik dan menjamur. Ironisnya, program-program kerakyatan menjadi lahan subur bagi pejabat/politisi untuk memperkaya diri.

Kebohongan politisi terhadap rakyat berdampak luas pada persoalan-persoalan lain termasuk menguatnya gerakan golput. Dua hari lalu Kompas mengadakan Jejak Pendapat yang menunjukkan masyarakat semakin apatis untuk terlibat dalam politik dan pemerintahan. Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06%. Sama halnya dalam Pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dari periode (2008) ke periode (2013) semakin menurun. Misalnya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur (Pilgub) NTT tahun 2008 mencapai 80,47%, tahun 2013 menurun menjadi 78%, Pilgub Bali tahun 2008 mencapai 76,44%, tahun 2013 menurun menjadi 74%, Pilgub NTB tahun 2008 mencapai 74,95%, tahun 2013 menurun menjadi 70,46%, Pilgub Sumsel tahun 2008 mencapai 72,79%, tahun 2013 menurun menjadi 66,9%, Pilgub Jabar tahun 2008 mencapai 67,31%, tahun 2013 menurun menjadi 63,44%, Pilgub Sumut tahun 2008 mencapai 59,13%, tahun 2013 menurun menjadi 53,96%, Pilgub Jateng tahun 2008 58,45%, tahun 2013 menurun menjadi 48,5%.

Diharapkan politisi menyadari pentingnya menjaga amanah masyarakat dalam menjalankan segala tugas dan fungsinya. Isu kemiskinan tidak sedakar dijadikan sebagai isu sesaat untuk kepentingan meraih kekuasaan. Namun lebih dari itu, isu kemiskinan harus dipandang sebagai beban moral bersama yang harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga di tahun Pemilu ini (tahun 2013-2014) terdapat politisi-politisi yang memiliki komitmen tinggi terhadap amanah rakyat, konstitusi, bangsa, dan negara untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

Harian Bhirawa, 22 Oktober 2013

## MENAKAR KUALITAS PARTAI POLITIK

**D**ua bulan lalu Lembaga Survei Nasional (LSN) melansir data minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Minimnya kepercayaan masyarakat ini tentu didasari minimnya peran dan fungsi partai politik dalam proses politik. Partai politik seolah tidak memahami peran dan fungsinya. Pasalnya partai politik dalam proses politik tidak menampakkan diri sebagai institusi politik yang berperan melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, justru hanya menjadi sarana para elit dalam meraih kekuasaan pribadi dan kelompok. Selain itu, fungsi rekrutmen partai politik cenderung elitis. Partai politik hanya mengusung kader-kader yang dinilai memiliki kekuatan politis dan ekonomis.

Bahkan tidak sedikit partai politik mengusung kader yang bermasalah secara hukum. Dampak perilaku elitis partai politik ini adalah buruknya kinerja DPR RI, DPRD, dan Kepala Daerah. Kader-kader partai politik yang berada di parlemen maupun

sebagai kepala daerah tidak terlalu banyak memberikan kontribusi positif bagi pembangunan, justru membuat bangsa dan negara terbelakang dalam segala aspek. Sederet problematika tersebut membuat masyarakat tidak percaya terhadap partai politik sebagai institusi pejuang nasib rakyat, bangsa dan negara.

### **Parpol Merusak Demokrasi**

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan. Pasalnya, partai politik adalah elemen terpenting bagi sistem demokrasi. Partai politik merupakan institusi yang wajib ada didalam sistem demokrasi karena institusi ini salah satu institusi formal masyarakat yang menandingi dan menyeimbangkan peran negara atau pemerintah. Menurut Miriam Budiarjo (2012) partai politik adalah salah satu infrastruktur sitem politik yang mengontrol berjalannya suprastruktur politik seperti Presiden, Kepala Daerah, dan Birokrasi. Miriam mengatakan tanpa partai politik suprastruktur politik akan mengarah pada terciptanya lingkungan dan situasi politik otoriter dan totaliter.

Keberadaan partai politik sangat penting untuk kemajuan demokrasi. Karena itu, minimnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik secara langsung melumpuhkan demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan. Apabila persoalan ini terus berlangsung bukan tidak mungkin demokrasi hanya sekadar topeng bagi bangsa dan negara Indonesia. Persoalan ini tentu tidak diinginkan semua pihak terutama masyarakat sipil pro demokrasi.

Memasuki tahun Pemilu, partai politik perlu kerja keras untuk menanamkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat sehingga demokrasi tidak sekadar topeng politik belaka. Namun sungguh disayangkan upaya-upaya partai politik mengembalikan kepercayaan masyarakat sangat konvensional dan tidak bermakna positif bagi kehidupan masyarakat. Akhir-akhir ini partai politik melakukan upaya-upaya pencitraan dengan beragam cara diantaranya iklan dimedia massa, pemasangan spanduk, baliho, dan langkah-langkah lain yang dianggap mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Upaya-upaya konvensional partai tersebut justru memperburuk kinerja partai politik dihadapan masyarakat. Masyarakat akan bertannya-tanya, darimana partai

politik mendapatkan dana untuk iklan besar-besaran di media cetak dan elektronik, dan membuat baliho serta spanduk yang tidak sedikit.

Mengingat transparansi anggaran partai politik sangat minim bahkan tidak pernah dilakukan, maka secara langsung memicu spekulasi masyarakat untuk beropini "anggaran yang dimiliki partai politik untuk pencitraan adalah dari hasil korupsi". Apalagi akhir-akhir ini nampak beberapa kader partai politik melakukan tindakan korupsi untuk kepentingan partai politik. Kasus korupsi Hambalang dan Daging Sapi, misalnya, terdapat indikasi korupsi yang dilakukan oleh kader adalah untuk kepentingan partai. Pencitraan konvensional seperti tersebut menjadikan wajah ruang publik semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Masyarakat sering mengeluhkan persoalan ini sehingga memicu munculnya opini buruk terhadap partai politik "partai politik perusak ruang publik". Pencitraan konvensional sebaiknya ditinggalkan karena memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik.

### **Modernisasi Partai Politik**

Sudah saatnya para elit politik memiliki gagasan dan ide untuk mengelola partai politik lebih modern dan merakyat. Hemat saya modern dan merakyat adalah dua kata kunci untuk meraih kesuksesan menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Dua kunci tersebut telah dibahas secara baik oleh Firmanzah (penulis buku "Mengelola Partai Politik"). Firmanzah menguraikan bagaimana sebaiknya partai politik dikelola sehingga mampu meraih kesuksesan "menanamkan kepercayaan masyarakat".

Perkembangan demokrasi memberi kesempatan luas bagi elemen bangsa mendirikan dan mengelola partai politik. Sayangnya, pendiri dan pengelola partai politik dinilai belum mampu menjadikan partai politik sebagai sarana politik efektif untuk membangun demokrasi. Menurut Firmanzah penyakit utama yang membuat partai politik tidak berjalan dengan baik sebagai organisasi pengembang demokrasi, adalah cara pandang pengelola partai politik yang tradisionalistik.

Acapkali pengelola partai politik menjadikan partai politik sebagai sarana pencari kekuasaan semata. Mereka seolah lupa

peran dan fungsi partai politik selain sebagai sarana mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan juga memberdayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama partai politik, bukan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat sebagaimana yang dikehendaki nilai-nilai demokrasi. Ironisnya, kekuasaan yang didapatkan dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri, anggota, kelompok, dan golongan-golongan tertentu sehingga politik dinasti semakin kuat dalam tubuh partai politik.

Menurut Firmanzah sebaiknya pengelolaan partai politik harus diarahkan pada nilai-nilai modernitas yaitu nilai keterbukaan dan kemandirian. Keterbukaan yang dimaksud adalah pengelola partai politik harus terbuka dengan perkembangan informasi dan teknologi. Informasi dan teknologi dijadikan sebagai bekal utama untuk mengelola partai politik sehingga menjadikannya sebagai organisasi modern dan dapat membuka akses masyarakat untuk dapat memahami dan mengerti arah perjuangan partai politik.

Semakin masyarakat memahami arah perjuangan partai politik maka semakin terarah dan jelas basis massa (kekuatan politik) partai politik. Partai politik tidak dapat berdiri kokoh tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, pengelolaan partai politik harus mampu memanfaatkan informasi dan teknologi sebagai sarana sosialisasi politik yang bertujuan membangun pemahaman masyarakat tentang visi, ideologi, cita-cita, dan prinsip kepartaian.

Kemandirian yang dimaksud adalah kekuatan sumber daya partai politik tidak bergantung pada negara dan pihak asing terutama terkait dengan keuangan. Menurut Firmanzah kemandirian partai politik dapat dibangun melalui gagasan inovasi dan kreativitas pengelola partai politik. Menurutnya pengelola partai politik jangan hanya sibuk mencari kekuasaan namun pengembangan sumber daya keuangan harus dilakukan dengan cara membangun unit-unit usaha yang mampu memperkuat finansial partai politik.

Nilai keterbukaan dan kemandirian seperti di atas akan menjadikan partai politik sebagai organisasi aktif, terus bergerak, tanpa dibatasi waktu dan ruang, dan secara langsung menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Lebih dari hal tersebut, keterbukaan dan kemandirian



menjadikan gerakan politik partai semakin kuat, kritis, dan mampu membuat kebijakan-kebijakan publik berorientasi jangka panjang (visioner) untuk masa depan pembangunan bangsa dan negara serta kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Menurut Firmanzah kunci membangun keterbukaan dan kemandirian partai, adalah pengelolaan dan seluruh fungsionaris partai politik harus memiliki visi kepemimpinan yang kuat dalam menggerakkan organisasi partai secara permanen yaitu gerakan tanpa dibatasi waktu dan ruang.

Gerakan keterbukaan dan kemandirian partai politik tidak hanya pada momen pemilu saja, namun harus dilakukan sepanjang waktu, komunikasi kerakyatan harus terus dibangun, keberpihakan kerakyatan harus terus dilakukan, kebijakan kerakyatan harus terus dibuat dan didukung, sosialisasi dan edukasi politik kerakyatan harus terus dilakukan, rekrutmen politik harus terus berasaskan nilai-nilai keadilan, dan rotasi kepemimpinan partai harus dijalankan. Setidaknya harapan masyarakat terhadap kesebelas partai politik kita adalah memiliki keterbukaan dan kemandirian sehingga keberadaan mereka sebagai organisasi politik benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indonesia seutuhnya.

Okezone.com, 20 Januari 2014

## GOLPUT BUKAN KEINGINAN RAKYAT

**M**asyarakat semakin *apatisme* untuk ikut terlibat dalam urusan politik terutama ikut memilih pemimpin dalam Pemilu (Pemilihan Umum) dan Pilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Fenomena *apatisme* ini menunjukkan semakin menguatnya suara golput dalam berdemokrasi. Menguatnya *apatisme* politik dan suara golput dinilai karena perilaku dan kinerja buruk politisi dan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap waktu masyarakat menyaksikan perilaku buruk politisi dan birokrasi seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Disamping itu, masyarakat tidak merasakan pembangunan dan kesejahteraan, justru mayoritas masyarakat hidup dalam perangkap kemiskinan.

Hasil Jejak pendapat Kompas menunjukkan Pemilu 1999, partisipasi masyarakat 92,74%, lalu pada Pemilu 2004 turun menjadi 84,07%, dan pemilu 2009 turun menjadi 70,06%. Sama halnya dalam Pemilu, partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dari periode (2008) ke periode (2013)

semakin menurun. Misalnya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur (Pilgub) NTT tahun 2008 mencapai 80,47%, tahun 2013 menurun menjadi 78%, Pilgub Bali tahun 2008 mencapai 76,44%, tahun 2013 menurun menjadi 74%, Pilgub NTB tahun 2008 mencapai 74,95%, tahun 2013 menurun menjadi 70,46%, Pilgub Sumsel tahun 2008 mencapai 72,79%, tahun 2013 menurun menjadi 66,9%, Pilgub Jabar tahun 2008 mencapai 67,31%, tahun 2013 menurun menjadi 63,44%, Pilgub Sumut tahun 2008 mencapai 59,13%, tahun 2013 menurun menjadi 53,96%, Pilgub Jateng tahun 2008 58,45%, tahun 2013 menurun menjadi 48,5%.

Fenomena golput ini sangat bertentangan dengan gerakan reformasi 1998. Salah satu tujuan gerakan reformasi 1998 adalah mewujudkan demokratisasi pada segala aspek terutama dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Demokratisasi yang dimaksud adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan seperti menentukan pemimpin politik secara langsung, membuat kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tuntutan reformasi ini direspon dengan dikeluarkan dan dibentuknya sejumlah konstitusi pendukung jalannya demokrasi dan meluasnya partisipasi publik dalam kehidupan politik dan pemerintahan seperti diterapkannya sistem multi partai dan sistem pemilihan langsung. Dua sistem tersebut menjamin warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Reformasi telah memasuki umur satu dasawarsa lebih namun partisipasi masyarakat dalam politik semakin lama semakin merosot. Angka golput semakin meningkat sebagaimana hasil jejak pendapat Kompas di atas. "Tidak ada asap tanpa api", "tidak ada masalah tanpa sebab". Pepatah ini relevan untuk membaca fenomena golput di tanah air. Tidak mungkin golput muncul begitu saja tanpa ada sebab yang memicunya. Diawal bagian dari tulisan ini disinggung fenomena golput dikarenakan perilaku dan kinerja buruk politisi dan birokrasi.

Tampaknya masyarakat muak dengan politisi dan birokrasi baik yang ada di level pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Di tingkat pusat, setiap saat masyarakat menyaksikan kasus tindakan korupsi politisi dan birokrasi seperti kasus Century, Hambalang, Simulator SIM, Impor Daging Sapi, dan baru-baru ini

muncul kasus SKK Migas. Sederet kasus tersebut adalah sedikit dari banyak kasus lain yang melibatkan politisi dan birokrasi.

Di tingkat daerah, masyarakat sangat mudah menemukan tindakan KKN yang dilakukan politisi dan birokrasi. Politisi dan birokrasi seolah tidak takut dan sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan tindakan KKN. Hasil kajian Indonesia Public Institute (IPI) tentang Korupsi Kepala Daerah, misalnya, sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, hingga Juli 2013 terdapat 298 kepala daerah dari 524 total jumlah kepala daerah di Indonesia tersangkut masalah korupsi, baik sebagai saksi, tersangka terdakwa atau terpidana korupsi.

Politisi DPRD dan birokrasi SKPD (satu kerja perangkat daerah) tidak mau ketinggalan dari kepala daerah untuk melakukan tindakan KKN. Kementerian dalam negeri (Kemendagri) merilis terdapat 3.000 anggota DPRD se-Indonesia tersangkut persoalan hukum. Selain itu, acapkali birokrasi PNS seperti kepala SKPD termasuk Sekretariat Daerah (Sekda) melakukan tindakan korupsi.

Korupsi dilakukan beragam modus seperti penggelapan pajak daerah, penggelapan anggaran daerah, penyusunan APBD tanpa didasari standar analisis belanja yang tepat, dan berbagai modus lain dilakukan untuk memperkaya diri, anggota, golongan, dan kelompok. Disisi lain, masyarakat hidup dalam keadaan sesak karena kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, keterbatasan rumah layak huni, keterbatasan akses informasi dan pelayanan, dan berbagai perangkat kemiskinan lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang atau 11,37%. Angka kemiskinan ini tentu melebihi target yang disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2013 dimana angka kemiskinan ditetapkan sebesar 10,5%. Berdasarkan data BPS bulan Februari 2013 menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,17 juta orang atau 5,92%, dimana Pemerintah menargetkan sebesar 5,5 - 5,8% di akhir tahun 2013. Angka-angka ini menunjukkan bahwa 1 diantara 9 orang Indonesia adalah rakyat miskin dan 1 diantara 17 orang Indonesia

adalah pengangguran (Hentje Pongoh, 2013).

Kendati program pembangunan infrastruktur terus digulirkan pemerintah namun kondisi pembangunan infrastruktur daerah dinilai masih jauh dari harapan. Masyarakat masih belum dapat menikmati infrastruktur sebagai sarana kesejahteraan. Di Jawa Timur (Jatim), misalnya, meskipun dikenal sebagai daerah yang maju dalam segi pembangunan namun tetap saja kondisi riil masyarakat Jatim tidak mendapatkan pelayanan infrastruktur memadai dari pemerintah daerah propinsi Jatim.

Baru-baru ini, masyarakat di beberapa Kabupaten/Kota Jatim kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan mereka kesulitan mendapatkan air untuk menopang kebutuhan pertanian sehingga sejumlah masyarakat tani mengalami kerugian karena kekeringan.

Masyarakat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), juga menjadi cerminan buruk kondisi kehidupan masyarakat. Masyarakat NTB kesulitan mendapatkan pelayanan memadai dari pemerintah daerah setempat. Kendati pemerintah propinsi NTB mengeluarkan sejumlah kebijakan kerakyatan seperti PIJAR namun kondisi riil masyarakat NTB menyedihkan. Berdasarkan catatan Bali Post, kasus busung lapar yang ada di NTB tidak dapat dibilang kecil. Tahun 2004 saja ditemukan ratusan kasus di Lombok. Ratusan kasus pun mencuat di Pulau Sumbawa. Hingga 2013, diperkirakan penderitanya mencapai 458 orang.

Kondisi buruk kehidupan masyarakat di daerah Jatim dan NTB, juga terjadi diberbagai daerah lain seperti di daerah NTT, Bali, Sumsel, Jabar, Sumut, Jateng, Papua, dan daerah-daerah lain. Karena itu, tidak heran masyarakat semakin apatis (golput) untuk terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan termasuk dalam Pemilu dan Pemilukada. Pada konteks ini, meningkatnya golput bukan karena rakyat namun disebabkan perilaku dan kinerja buruk pemerintah, politisi, dan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hemat saya, apabila pemerintah, politisi, dan birokrasi terus gagal mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing dalam segala aspek bukan tidak mungkin angka golput semakin meningkat.

Membangun kepercayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan tidak cukup langkah-langkah

konvensional seperti yang dilakukan pemerintah, politisi, dan birokrasi selama ini, yakni pemasangan iklan di media cetak, elektronik, pemasangan spanduk, blusukan dadakan, dan upaya-upaya konvensional lain. Upaya konvensional tersebut justru membangkitkan emosi masyarakat untuk terlibat aktif dalam politik dan pemerintahan. Pasalnya apa yang dipublikasikan tidak sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di lapangan. Mestinya pemerintah, politisi, dan birokrasi harus sadar bahwa masyarakat cerdas dalam memahami kondisi kehidupan senyatanya.

Langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pemilukada, dan Pileg, adalah pemerintah harus memberikan perhatian serius untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat. Perhatian dimaksud adalah pemerintah, politisi, dan birokrasi harus bersama-sama mengambil peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara menghindari diri dari tindakan korupsi, membuat dan menjalankan program pembangunan dengan baik dan tepat sasaran, menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat dijangkau masyarakat, dan menyediakan infrastruktur sebagai penopang kehidupan masyarakat.

Okezone.com, 12 September 2013

## KORUPSI INSTITUSI POLITIK DEMOKRASI

**B**aru-baru ini Transparency Internasional (TI) merilis data survei tentang institusi-institusi korup Indonesia. Hasil survei TI yang diselenggarakan September 2012 hingga maret 2013 menunjukkan intitusi-intituti politik, birokrasi, swasta, dan sosial masih dilingkari penyakit kronis korupsi. Ironisnya, institusi penegak hukum (Polri) dan pembuat peraturan hukum (Parlemen) berada di posisi terkorup dari institusi-institusi lainnya. Sejati-nya institusi-institusi tersebut adalah ruang dimana hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

Korupsi seolah membudaya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Kasus korupsi bermunculan dari berbagai level pemerintahan dan terjadi diberbagai institusi manapun. Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, misalnya, acapkali para pemilik kekuasaan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Kasus korupsi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik ini terjadi di tingkat pemerintah pusat dan daerah serta

dilakukan pejabat level bawah hingga tertinggi. Dalam proses politik juga menjadi ruang subur tumbuhnya korupsi. Para pemangku kepentingan menjadikan kepentingan pribadi dan kelompok sebagai landasan pembentukan kebijakan sehingga mengarah kepada keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, bukan kepentingan publik.

Hemat saya proses penentuan kebijakan (proses politik) dan penyelenggaraan pelayanan publik menjadi satu kesatuan ruang yang saling mendukung pembudayaan korupsi. Kedua ruang tersebut saling terkait dalam memperkuat gerakan tindakan korupsi. Berikut ini penulis menguraikan bagaimana wajah ruang politik penuh dengan permainan kepentingan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Dan selanjutnya penulis menguraikan bagaimana wajah ruang pelayanan publik syarat dengan tindakan korupsi. Kedua ruang ini syarat dengan tindakan transaksional yang menguntungkan para pemangku kepentingan khususnya yang memiliki akses kekuasaan dan kewenangan.

### **Proses Politik dan Institusi Korup**

Proses politik dalam penentuan kebijakan merupakan ruang dimana pemangku kepentingan seperti eksekutif, legislatif, pengusaha, dan masyarakat sipil secara bersama-sama menentukan kebijakan publik. Para pemangku kepentingan berinteraksi untuk membicarakan bentuk dan muatan kebijakan yang akan disepakati bersama. Sebagai negara demokrasi, interaksi pemangku kepentingan dalam proses penentuan kebijakan dipandang sebagai hal yang wajar, dan tentunya interaksi tersebut harus berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Interaksi pemangku kepentingan diarahkan menentukan kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik yang dinilai bermasalah. Pada praktiknya, justru pemangku kepentingan membuat kebijakan untuk memperbanyak adanya persoalan-persoalan publik seperti kemiskinan, pengangguran, dan persoalan-persoalan sosial lainnya.

Hemat saya banyaknya kebijakan bermasalah disebabkan kuatnya pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan. Menurut Lord Acton "kekuasaan yang kuat cenderung korup". Tesis Acton ini benar-benar nyata terjadi pada lingkaran kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan



peran dan fungsinya sebagai aktor pembuat dan pelaksana kebijakan. Acapkali eksekutif dan legislatif membuat kebijakan terutama membuat kebijakan anggaran (APBN/D) dilandasi kepentingan pragmatis, dimana mereka saling menguntungkan untuk pribadi dan golongan.

Budaya korup eksekutif dan legislatif semakin diperkuat adanya peran kelompok-kelompok borjuasi (pengusaha) yang berusaha mempengaruhi dan mengarahkan eksekutif dan legislatif untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan mereka secara ekonomi. Fenomena ini tampak nyata dari beberapa kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus korupsi daging sapi, misalnya, tidak lepas dari peran borjuasi importer yang berusaha mempengaruhi pemilik kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur kebijakan impor daging sapi. Pada kasus ini pengaruh borjuasi begitu kuat hingga menggoyahkan "*iman*" penguasa untuk melakukan tindakan korupsi. Kasus SKK Migas, juga menjadi contoh nyata adanya peran pengusaha atau borjuasi yang melakukan upaya kolusif dengan pemilik kekuasaan hingga berakhir pada kesepakatan yang sama, yakni mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari proyek-proyek migas.

Proses politik dalam penentuan kebijakan masih menjadi lahan subur bagi oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri. Proses politik tak ubah ruang sandiwara pemilik kekuasaan untuk bercanda tawa di atas penderitaan rakyat. Karena itu, keberadaan institusi-institusi publik kita hanyalah alat bagi oknum-oknum untuk bersandiwara mencari kekayaan. Fenomena ini telah didiskusikan secara serius oleh Karl Marx dan kawan-kawannya. Karl Marx hingga ia mati tidak berkeyakinan bahwa negara (eksekutif, legislative, yudikatif, dan kelompok-kelompok borjuasi) akan memperhatikan kepentingan umum (masyarakat) seperti yang diyakini filosof Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, Montesquiere, dan Hegel. Justru menurut Karl Marx negara adalah alat kelompok-kelompok penguasa dan borjuasi untuk memperkaya diri serta menindas kelompok-kelompok yang lemah. Pada konteks ini, berdasarkan uraian sebelumnya, hemat saya konsepsi Karl Marx tentang negara masih tampak nyata dalam kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia.

## **Wajah Pelayanan Publik**

Proses korup penentuan kebijakan seperti yang dijelaskan di atas melahirkan kekecewaan-kekecewaan masyarakat terhadap institusi-institusi publik yang awalnya diharapkan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan pro rakyat untuk kemajuan bangsa dan negara. Kekecewaan tersebut semakin diperkuat lagi dengan wajah buruk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh intitusi-institusi publik kita. Sejatinya keberadaan institusi-institusi publik adalah untuk melayani masyarakat dengan baik, murah, dan tanpa diskriminasi.

Secara normatif pemerintah telah membentuk sejumlah payung hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang murah, cepat, dan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengatur dengan baik mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan dalam undang-undang tersebut mengatur perilaku dan karakter penyelenggara pelayanan publik seperti bagaimana wajah ditampilkan ketika melayani masyarakat dan bagaimana cara berbicara dan cara senyum kepada masyarakat. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan tanpa diskriminatif. Dalam undang-undang KIP ini diatur kewajiban penyelenggara (badan) publik untuk menyampaikan informasi publik yang tepat, murah, dan tidak memanipulasi masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berhak untuk mengetahui segala informasi publik termasuk terkait dengan standar pelayanan publik.

Pada kenyataannya, justru intitusi publik memanfaatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publiknya untuk mendapatkan keuntungan sehingga pelayanan publik masih sangat mahal dan cenderung diskriminatif. Pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan anggaran 20% untuk pendidikan dan kesehatan namun faktanya masih banyak masyarakat belum mendapatkan pelayanan memadai dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Masih banyak fenomena masyarakat putus sekolah diakibatkan mahal biaya pendidikan, dan masih banyak masyarakat yang tidak berobat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan karena mahal biaya

kesehatan. Pelayanan administratif seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, sertifikat tanah, surat ijin mengemudi, ijin usaha, dan ijin bangunan dinilai masih syarat dengan prosedural dan mahal.

Titik persoalan sulitnya masyarakat mengakses pelayanan publik seperti yang digambarkan di atas adalah dikarenakan paradigma birokrasi pemerintah yang berorientasi prosedural dan biaya. Birokrasi pemerintah ketika melayani masyarakat selalu menyodorkan prosedur-prosedur yang *rigid* dan membuat masyarakat kebingungan untuk melewatinya sehingga pelayanan publik membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan sulit didapatkan. Pada sisi lain, birokrasi pemerintah selalu mempermudah pelanggan untuk mendapatkan layanan prima manakala pelanggan memiliki uang untuk membayarnya dan atau memiliki "orang dalam". Karena itu, pelayanan publik masih syarat unsur diskriminatif. Mayoritas birokrasi pemerintah masih menjadikan fungsi pelayanan publik sebagai alat untuk memperkaya diri.

Uraian di atas menggambarkan bahwa ruang politik dan pelayanan publik merupakan dua variabel yang saling bersinggungan dijadikan oleh oknum-oknum tertentu sebagai tempat untuk memperkaya diri sehingga tindakan korupsi berjalan sistimatis dan membudaya. Wajah korup ruang politik dan pelayanan publik membawa dampak serius bagi rusaknya sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu, dibutuhkan langkah-langkah serius seluruh *stakeholder* bangsa untuk mewujudkan wajah ruang politik dan pelayanan publik yang berkeadaban sehingga menjadi tempat strategis untuk melahirkan kebijakan-kebijakan populis serta pelayanan publik yang berkemanusiaan.

Okezone.com, 23 September 2013

## MENAKAR KUALITAS PEMILU 2014

Tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi atau yang disebut Pemilihan Umum (Pemilu). Pada pesta demokrasi nanti, masyarakat Indonesia akan memilih pemimpin dan menentukan arah bangsa. Karena itu, pesta lima tahunan ini dipandang sebagai kegiatan penting bagi bangsa Indonesia. Mengingat Pemilu sebagai kegiatan penting maka seluruh *stakeholders* bangsa harus menyiapkan diri untuk menyongsong kesuksesan pelaksanaan Pemilu.

Indikator kesuksesan pelaksanaan Pemilu ditunjukkan oleh dua hal yaitu adanya kompetisi politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang berkualitas yaitu pemimpin yang bertanggung jawab terhadap persoalan bangsa. Dua hal tersebut sangat tergantung dari kualitas politik kontestan pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Semakin baik kualitas politik kontestan dan masyarakat maka kualitas pelaksanaan Pemilu semakin baik.

## Kualitas kontestan Pemilu

Secara umum kontestan Pemilu adalah partai politik beserta politisi yang diusungnya dalam pemilu (Caleg). Partai politik dan politisi dipandang sebagai kontestan utama dan memiliki tanggung jawab utama untuk kesuksesan pemilu. Sejauh ini upaya partai politik untuk mensukseskan Pemilu masih belum maksimal, justru partai politik dinilai tidak memikirkan bagaimana Pemilu nanti dapat berjalan dengan baik. Partai politik dinilai hanya sibuk mengatur strategi untuk mendapatkan kekuasaan semata, bukan untuk kesuksesan Pemilu. Ironisnya, acapkali partai politik melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan termasuk cara-cara yang menyimpang dari asas-asas pemilu.

Asas pemilu tentang ketertiban kampanye, misalnya, seringkali diabaikan oleh partai politik. Sejatinya partai politik tidak diperbolehkan memasang spanduk dan baliho yang dapat mengganggu kenyamanan publik. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2013 melarang partai politik memasang iklan politik yang dapat merusak keindahan dan kenyamanan ruang publik. Pada praktiknya baliho dan spanduk partai politik terpasang diberbagai ruang dan mengganggu kenyamanan publik. Sepanjang jalan raya terdapat gambar partai beserta politisi yang diusungnya sebagai calon legislatif maupun calon presiden.

Partai politik juga tidak patuh terhadap asas pemilu tentang transparansi pengelolaan anggaran kampanye. Beberapa waktu lalu KPU mewajibkan partai politik untuk melaporkan jumlah anggaran kampanye. Selain peraturan KPU, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mewajibkan semua badan publik termasuk partai politik untuk transparan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Pada praktiknya tidak banyak partai politik yang patuh terhadap peraturan KPU dan UU KIP tersebut. Pada konteks ini, partai politik belum mampu menunjukkan dirinya sebagai badan publik yang transparan, tanggung jawab, dan profesional.

Kualitas partai politik tersebut semakin diperparah buruknya kualitas politisi yang diusungnya sebagai calon legislatif/Caleg (calon DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota). Harus diakui, banyak para Caleg diusung partai politik yang tidak memiliki kemampuan memadai dalam bidang ke-legislatif-an. Jejak Pendapat Kompas

2013 lalu menunjukkan mayoritas para Caleg tidak memahami tugas dan fungsinya ketika nanti menjadi anggota legislatif.

Ironisnya, jejak pendapat Kompas juga menunjukkan motivasi para Caleg ingin menjadi anggota legislatif adalah untuk mendapatkan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri, dan mempermudah praktik kolusi dan nepotisme. Dalam pandangan para Caleg, anggota legislatif memiliki kekuasaan yang besar dalam mengendalikan roda pemerintahan sehingga nanti mereka dapat membuat kebijakan yang berbasiskan kepentingan pribadi dan partai politik. Selain motivasi kekuasaan, mereka juga memiliki motivasi menjadi anggota legislatif untuk memperbaiki nasib dan status. Motivasi terakhir ini biasanya dimiliki para Caleg yang selama ini profesinya "serabutan" seperti tukang ojek, tukang parkir, pedagang kaki lima, dan preman.

Partai politik mengusung para Caleg bukan tanpa dasar dan alasan rasional. Partai politik mengusung para Caleg atas dasar pertimbangan pragmatis seperti kemampuan ekonomi dan massa. Partai politik lebih baik mengusung orang berduit daripada orang yang jujur, berilmu, dan berintegritas. Partai politik lebih baik mengusung preman yang ditakuti rakyat daripada orang yang religius dan berilmu namun tidak ditakuti rakyat.

Kualitas buruk partai politik dan para Caleg yang diusungnya akan berimplikasi serius terhadap buruknya kualitas Pemilu. Pemilu hanya menjadi sarana bagi partai politik dan politisi untuk mendapatkan kekuasaan semata. Kondisi demikian menjadikan Pemilu sekadar pesta demokrasi lima tahunan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki kemampuan memadai dalam menjalankan roda pemerintahan terutama membuat dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar.

### **Kualitas Politik Masyarakat**

Di tengah buruknya kualitas partai dan politisi (Caleg) tersimpan harapan besar terhadap kualitas politik masyarakat. Di-harapkan kuliatas politik masyarakat mampu melawan kualitas buruk partai dan politisi. Kualitas politik masyarakat harus mampu menyingkirkan partai dan politisi busuk. Melalui sistem pemilu suara terbanyak, masyarakat dengan mudah menyingkirkan partai

dan politisi busuk. Karena pada sistem ini sepenuhnya masyarakat menentukan kemenangan politisi, bukan partai politik. Masyarakat dapat memberikan kepercayaan penuh kepada politisi-politisi yang berdedikasi, berintegritas, berilmu, dan berpengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar.

Hemat saya saat ini kualitas politik masyarakat perlu dikaji dan didiskusikan secara kritis. Pasalnya, mengaca pada praktik politik masyarakat diberbagai pemilihan kepala daerah dan kepala desa masih menyisakkan banyak persoalan diantaranya menguatnya praktik *money politics* di tengah masyarakat. Masyarakat seolah tak berdaya menolak praktik *money politics*, justru mendukung dan menguatkan.

Berdasarkan survei penulis diberbagai pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Jawa Timur menunjukkan praktik *money politics* semakin menguat. Kontestan Pilkades tidak tanggung-tanggung membeli suara masyarakat dengan harga mahal yang berkisar antara 100 ribu hingga 200 ribu per suara. Mahalnya harga suara tersebut membuat pemilik suara tak berdaya untuk menjunjungtinggi nilai-nilai demokrasi. Para calon kepala desa harus menghabiskan uang banyak untuk mengikuti dan memenangkan Pilkades. Calon kepala desa harus menghabiskan uang antara ratusan juta hingga puluhan miliar. Itu-pun tak menjamin mereka untuk menjadi pemenang dalam Pilkades.

Besar kemungkinan di tengah menguatnya prilaku *money politics* masyarakat menjadikan Pemilu 2014 nanti tidak mampu melahirkan kepemimpinan bangsa yang mampu membawa Indonesia menuju yang lebih baik, berdaya saing, bermartabat, dan berkemajuan. Prilaku *money politics* hanya menjadikan Pemilu sebagai sarana melahirkan pemimpin-pemimpin korup dan tak bertanggungjawab perhadap persoalan bangsa.

Hemat saya di tengah minimnya kualitas politik masyarakat, partai politik, dan politisi dibutuhkan upaya-upaya serius penyelenggara Pemilu dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperbaiki dan mewujudkan kualitas politik masyarakat, partai, dan politisi menuju yang lebih baik sehingga Pemilu 2014 nanti dapat melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, bermoral, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan Indonesia baru, Indonesia berkemajuan.

Okezone.com, 20 Januari 2014

## MENUJU NEGARA KONSTRUKTIF

**M**encermati perjalanan Negara Indonesia kadang membuat kami harus merenung panjang. Betapa tidak, berbagai persoalan bangsa seolah silih berganti tiada henti mulai dari persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam sebuah kesempatan seminar nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) (23/10), salah seorang pembicara, Sidarto Danusubroto, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyampaikan bahwa secara politik Undang-Undang Dasar kita banyak disimpangkan oleh Undang-undang. Pelaksanaan otonomi daerah misalnya telah jauh menyimpang dari "roh" Indonesia sebagai negara kesatuan. Sehingga tidak mengherankan jika lebih dari 90 persen pelaksanaan pemekaran daerah mengalami kegagalan. Karena semangat pemekaran tidak lagi untuk mendekatkan pelayanan publik, tetapi lebih pada untuk memperjuangkan kepentingan elit-elit tertentu.



Secara ekonomi, meskipun berbagai prestasi telah dicapai dalam bidang ini, bahkan berbagai kalangan memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat sejajar dengan negara ASEAN yang lain, namun masih saja menyisakan berbagai masalah. Diantara masalah ekonomi negara ini adalah ketidakberdayaan bangsa ini untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki. "Kepemilikan" kebun sawit di Riau misalnya tidak kurang dari 70 persen adalah milik Malaysia. Belum lagi eksploitasi hasil tambang di berbagai daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan. Apa yang bisa dinikmati oleh anak negeri jika negara memberikan ruang pada asing dengan mengizinkan kontrak lahan selama 90 tahun (Bardia, 23/10). Sementara rakyat kita harus rela dengan posisi sebagai buruh di negeri sendiri. Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Secara sosial, negara ini seolah telah kehilangan "roh" kebangsaan, rasa senasib sebagai sebuah bangsa. Justru sebaliknya yang mengemuka berbagai konflik antar entik, agama, berhadapan antar rakyat dengan rakyat, bahkan antar rakyat dengan negara sebagaimana terjadi di Riau baru-baru ini. Ideologi Pancasila seolah telah kehilangan kesaktiannya dengan mempersatukan dan mempererat bangsa ini dalam bangunan kuat sebagai sebuah bangsa dan negara. Sikap bangsa Indonesia yang sarat dengan toleransi, gotong royong, dan penuh kasih sayang telah berubah wajah menjadi sikap sangat tidak toleran dengan penonjolan primordialisme kesukuan, agama, dan golongan. Bangsa ini sarat dengan nafsi-nafsi, yang penting diri sendiri selamat, dan penuh kebencian diantara satu dengan yang lain.

Bagaimana negara ini harus dibangun? Menuju negara konstruktif merupakan sebuah keniscayaan jika negara ini hendak selamat mencapai tujuan. Untuk mewujudkannya tidak ada lain kecuali dilakukannya gerakan masif dan bahu membahu diantara stakeholder. Setidaknya terdapat tiga syarat untuk menuju negara konstruktif yakni: pertama negara yang mau mendengar dan bekerja, kedua, rakyat yang berhijrah dari kemiskinan dan kebodohan, serta ilmuwan yang memperjuangkan dan mencerdaskan.

## **Negara yang mau mendengar dan bekerja**

Negara acapkali memposisikan diri sebagai institusi yang serba tahu dan memposisikan rakyat sebagai yang serba tidak tahu. Akibatnya negara menjadi sangat dominan, seolah semua permasalahan rakyat ingin diselesaikan sendiri oleh negara dari permasalahan strategis hingga hal-hal teknis. Faktanya negara kedodoran, karena permasalahan bangsa ini sangat kompleks dan pelik. Negara seringkali memproduksi berbagai kebijakan, "angan" tetapi tidak tuntas dikerjakan. Meminjam istilah Anies Baswedan, yang penting bagi kita semua termasuk negara untuk mewujudkan negara konstruktif adalah "bukan turun angan tetapi turun tangan". Negara harus membuka pendengaran lebar-lebar, apa sesungguhnya yang dibutuhkan rakyat. Negara harus mau "mendengar" keluhan rakyat. Namun faktanya negara tidak mampu mendengar.

Pendengaran negara seolah telah tertutup oleh geliat politik menjelang pemelihan umum presiden (pilpres) 2014. Bagaimana kita bisa memahami bahwa negara telah mendengar keluhan rakyat jika rakyat Indonesia masih lebih dari 40 persen hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan hanya 8 persen yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT). Dapatkah kita mengatakan bahwa negara telah mendengar dan bekerja dengan baik jika masih banyak rakyat Indonesia harus terhalang untuk dapat sekolah pada jenjang yang lebih tinggi karena terhalang oleh tidak tersedianya infra struktur jalan yang memadai yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat pelayanan publik. Sementara pendidikan adalah escalator dan instrument rekayasa masa depan (Baswedan, 23/10). Negara harus mampu mendengar untuk kemudian bekerja mengangkat harkat dan martabat bangsa.

## **Rakyat yang berhijrah dari kemiskinan dan kebodohan**

Berhijrahnya rakyat dari kemiskinan dan kebodohan kearah rakyat cerdas dan sejahtera mengindikasikan berhasilnya negara mengawal dan mengantar rakyat Indonesia kearah yang lebih baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang rakyat dalam posisi terpuruk tentu sangat sulit akan terwujud negara konstruktif. Berhijrah tentu bermakna melakukan gerakan secara aktif an

sadar dari posisi yang kurang menguntungkan kearah yang lebih menguntungkan, dari keadaan miskin dan bodoh kearah sejahtera dan cerdas. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwa "kefakiran akan mengajak pada kekufuran".

Demokrasi akan dapat berjalan dengan baik jika rakyat secara ekonomi telah sejahtera. Adalah sebuah keniscayaan suara rakyat dapat dibeli karena mereka memerlukan sesuatu untuk menghidupi diri dan keluarganya. Mereka tentu tidak atau kurang berfikir bahwa ketika suara mereka dibeli akan menentukan pilihan kebijakan yang memiliki dampak masif bukan hanya bagi sekelompok orang tetapi untuk semua di negeri ini.

### **Ilmuwan yang memperjuangkan dan mencerdaskan**

Ilmuwan sebagai elit yang jumlahnya sangat sedikit acapkali tidak mampu membumikan pikiran-pikirannya untuk menjawab berbagai persoalan rakyat. Ilmuwan lebih banyak berkutat pada pergumulan teoritik dan menjadi menara gading yang tidak tersentuh rakyat kebanyakan. Sementara seharusnya kelompok inilah dengan kemampuan intelektualnya mampu menterjemahkan berbagai problema rakyat dengan kepiawaian dan kepekaan teoritik yang dimiliki. Bukan sebaliknya "memaksa" teori yang telah digeluti yang ironisnya bukan berasal dari kajian lokal tapi lebih banyak mengadopsi dari barat, dipaksakan sesuai dengan teori2 barat tersebut.

Tampaknya sudah saatnya ilmuwan menggali teori substantif dari kearifan lokal untuk menjelaskan persoalan bangsa dan negara ini. Yang lebih menyedihkan ilmuwan kita masih berfikir secara dikotomis dan memisahkan keilmuan secara terkotak-kotak dan tidak saling menyapa. Ilmu-ilmu sosial misalnya selama ini dinomorduakan. Ilmu sosial dinilai banyak kalangan seolah tidak memiliki peran nyata dalam pembangunan bangsa karena dia tidak melahirkan produk nyata layaknya ilmu eksak. Ilmu sosial seringkali "ditinggal" ketika negara melakukan pilihan kebijakan. Ilmuwan ilmu sosial baru akan dimintai pendapatnya ketika negara mengalami kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara berbagai persoalan bangsa ini tidak dapat dilepaskan dari peran ilmu sosial.

Hal tersebut tidak terlepas dengan cara pandang pemerintah

dan berbagai pihak yang selalu mengukur keberhasilan dengan produk nyata. Disisi lain ilmu lai di luar ilmu sosial juga tidak kalah pentingnya untuk berkontribusi terhadap pencerdasan bangsa. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya lagi mempertentangkan dan mendikotomikan disiplin ilmu sosial dan non sosial, tetapi keduanya saling menyapa dan berintegrasi untuk melepaskan berbagai persoalan bangsa ini. Semoga Negara Indonesia dapat keluar dari berbagai problem politik, ekonomi, sosial dan persolan lain dengan kecerdasan rakyat, pemimpin, dan intelektualnya menuju negara Indonesia yang konstruktif.

pemerintahan.umm.ac.id, 20 Agustus 2013

## MENCERMATI IMPLEMENTASI PROYEK E-KTP

Beberapa hari lalu masyarakat tersentak dikejutkan oleh adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 471.12/1826/SJ tertanggal 11 April 2013 yang intinya menjelaskan bahwa e-KTP tidak boleh difotokopi, distapler, dan diperlakukan buruk, hingga merusak fisik kartu. Berbagai kalangan, warga masyarakat, perbankan, kelurahan, DPR, bahkan YLKI mempertanyakan tentang surat edaran mendagri ini. Bagaimana tidak, jutaan e-KTP telah dicetak dan dibagikan kepada masyarakat, tentu mereka telah memanfaatkan e-KTP tersebut untuk berbagai keperluan antara lain dengan memfotocopynya.

Dengan tiba-tiba muncul surat edaran mendagri tersebut, tentu masyarakat bertanya-tanya dan sangat menyayangkan mengapa informasi tersebut disampaikan setelah proyek e-KTP ini beralangsur sejak tahun 2009. Menanggapi kehebohan di masyarakat, juru bicara kemendagri mengungkapkan dalam siaran di RRI pada tanggal 9 Mei 2013, yang intinya bahwa masyarakat salah memaknai surat edaran

mendagri tersebut. Menurutnya surat tersebut bukan untuk masyarakat tetapi untuk instansi pemerintah, pemda, perbankan dan swasta yang wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP, termasuk pembaca data (card reader).

Selanjutnya disampaikan bahwa e-KTP ditujukan untuk menuju budaya baru yakni identitas tunggal penduduk, mengurangi tindak kejahatan penipuan, bahkan terorisme dan yang terpenting adalah tentang keakuratan data penduduk. Oleh karena itu, dia meminta agar instansi pelayanan publik jangan lagi meminta foto copy KTP. Menurut saya apa yang disampaikan mendagri maupun juru bicaranya tersebut memang tidak ada yang salah. Diakui bahwa banyak kelebihan dari penggunaan e-KTP

Tapi persoalannya adalah mengapa peringatan tersebut baru dikemukakan sekarang bahwa e-KTP tidak boleh difotocopi. Bagaimana dengan nasib masyarakat yang telah terlanjur memfotokopi KTP berkali-kali, tentu mereka merasa cemas dan waswas khawatir e-KTPnya tidak lagi dapat berfungsi. Lalu bagaimana pula jika e-KTP benar-benar tidak berfungsi. Warga masyarakat harus mendapat penjelasan yang clear dari pemerintah. Bagaimana pengurusan prosedur pengurusannya kembali e-KTP yang rusak akibat di fotocopi, masih dapatkah masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang semestinya jika terjadi kerusakan pada e-KTP. Sementara untuk menerbitkan kembali, saya memperkirakan pemerintah tidak dapat melayani dengan cepat mengingat keterbatasan prosedur, infrastruktur alat, dan tenaga operasional. Tentu hal ini semua harus disiapkan oleh pemerintah, mengingat pembuatan e-KTP tentu tidak hanya sekali saja, secara masal.

Di sisi lain, hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam melayani penerbitan e-KTP bagi warga di pedalaman, dapatkah proyek ini menjangkau hingga ke pelosok tanah air sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Bagaimana pula dengan banyaknya kesalahan dalam perekaman data, dan sebagainya. Terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak masyarakat, tentang implementasi proyek e-KTP ini, yang harus dijawab oleh pemerintah.

## **Kekurang cermatan Pemerintah**

Mencermati implementasi proyek e-KTP, menurut hemat saya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan surat edaran mendagri Nomor 471.12/1826/SJ, pemerintah dalam hal ini mendagri, harus berani mengakui bahwa surat edaran tersebut memang terlambat. Seharusnya proyek e-KTP dengan dana trilyunan tersebut harus terencana sejak awal. Sehingga pada awal proyek e-KTP sudah disosialisasikan bagaimana pemanfaatannya oleh masyarakat dan instansi pelayan publik. Sangat dimungkinkan memang sejak awal pemerintah tidak mengetahui atau mengantisipasi hal ini, akan rusaknya chip e-KTP jika di fotocopi. Namun pertanyaan saya, benarkah chip e-KTP dengan teknologi tinggi/canggih dapat rusak hanya gara-gara difoto copy. Saya kira ahli di bidang ini harus angkat bicara.

Kedua, terlepas apakah surat edaran tersebut untuk instansi pemerintah/pelayan publik, pada ujungnya jangan sampai masyarakat yang menjadi korban atas permasalahan e-KTP ini Pemerintah harus jujur dan transparan akan berbagai persoalan e-KTP, mulai dari persoalan pendataan penduduk yang berhak menerima, penyebaran yang tidak merata, kualitas cetak yang masih jelek ataupun chip yang rusak, waktu pembuatan yang sangat lama dan berbagai permasalahan lain. Tentu kita semua tidak berharap e-KTP yang harapannya dapat memperlancar urusan warga untuk mengakses berbagai kepentingan seperti layanan administrasi kependudukan, kesehatan, asuransi, perbankan dan lain sebagainya, harus terhenti di tengah jalan. Jangan sampai terjadi warga dirugikan yakni tidak dapat memperoleh layanan semestinya dikankarena ketidaksiapan pemerintah dalam penyelenggaraan proyek e-KTP ini.

Ketiga, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat tentang keterbatasan yang dimiliki. Saya khawatir berbagai pembelaan diri atas berbagai kekurangan pemerintah dalam pelaksanaan e-KTP, memaksa rakyat berburuk sangka bahwa terjadi sesuatu, korupsi misalnya atas penyelenggaraan proyek e-KTP ini. Betapa tidak, anggaran untuk e-KTP mencapai angka Rp. 5,8 triliun, tahun 2012 tersedia 4,7 triliun dan untuk tahun 2013 1.045 triliun. Belum lagi dengan munculnya surat edaran mendagri tersebut, jangan sampai muncul prasangka masyarakat bahwa hal merupakan upaya

pemerintah dalam rangka pengadaan proyek baru card reader. Semoga hal itu tidak benar dan tentu kita semua tidak rela jika dana triliunan tersebut sia-sia karena kegagalan implementasi proyek e-KTP ini?

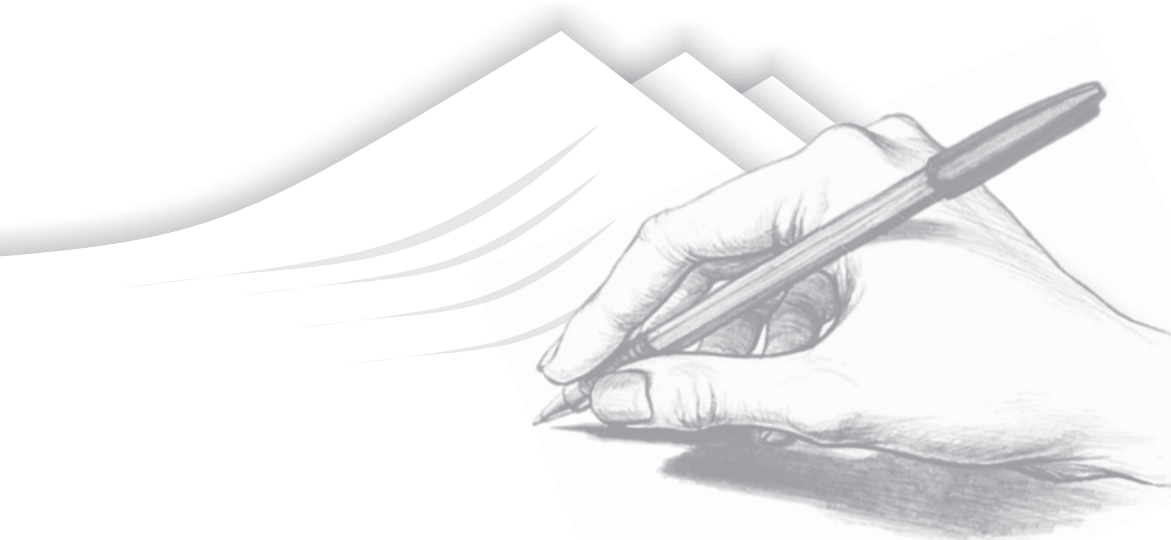
Keempat, pemerintah tidak boleh main-main dengan pilihan kebijakan e-KTP. Jika memang pemerintah telah berkomitmen menetapkan pilihan e-KTP menyusul era digital dan kemajuan teknologi, untuk keakuratan data penduduk, maka tidak ada kata lain kecuali pemerintah harus serius dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Memang disadari, tanpa kita mengikuti kemajuan teknologi, maka akan terjadi stagnasi atas bangsa ini, namun mengikuti perkembangan teknologi dengan setengah hati, maka kekacauan yang terjadi.

Hingga saat ini terkesan pemerintah kurang cermat dalam implementasi proyek e\_KTP, hal ini setidaknya ditandai oleh munculnya surat edaran mendagri sebagaimana telah dikemukakan, nyaris terhentinya pencetakan e-KTP karena kurangnya anggaran, dan tertundanya implementasi e-KTP, serta berbagai persoalan teknis di lapangan. Pemerintah seolah kurang menyiapkan seluruh perangkat pendukung dari hal *policy* hingga persoalan teknis. Pada akhirnya, kita semua berharap, semoga proyek e-KTP dapat keluar dari berbagai masalah yang melingkupinya dan 1 Januari 2014 Indonesia benar-benar telah memiliki kartu identitas tunggal canggih bagi penduduknya, menyongsong pemilu 2014.

Harian Bhirawa, 29 Agustus 2013







Bagian Ketiga

# DINAMIKA POLITIK LOKAL



## KORUPSI DAN OTONOMI DAERAH

**B**erdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga tahun 2013 terdapat 291 kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota terlibat dalam kasus korupsi. Jumlah tersebut terdiri dari keterlibatan gubernur sebanyak 21 orang, wakil gubernur tujuh orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Kebijakan otonomi daerah telah disalahgunakan oleh kepala daerah yang tidak bertanggung jawab. Angka korupsi kepala daerah melonjak tinggi sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Persoalan ini menunjukkan anomali kebijakan otonomi daerah. Harapan-harapan emas terhadap kebijakan otonomi daerah justru berbalik arah menjadi persoalan besar bagi pembangunan daerah.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberi harapan besar untuk

percepatan pembangunan daerah. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan urusan yang sangat besar dibandingkan di era orde lama. Pemerintah daerah dapat membangun daerah dengan cepat dan tepat melalui urusan wajib dan urusan pilihan yang dimiliki.

Pemerintah daerah manapun di Indonesia wajib menjalankan urusan wajib seperti pengembangan sektor pendidikan, pelayanan publik, kesehatan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan adalah urusan yang sesuai potensi daerah yang dimiliki dan wajib dijalankan dan dikembangkan untuk pembangunan daerah. Melalui dua urusan tersebut, diharapkan kepala daerah dapat membuat kebijakan-kebijakan inovatif, produktif, dan berdaya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Penyebab tindakan korupsi**

Lima belas tahun sudah otonomi daerah berjalan namun harapan di atas tak kunjung nampak. Kepala daerah justru memanfaatkan kebijakan otonomi daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Faktor-faktor yang mendorong kepala daerah melakukan tindakan korupsi diantaranya adalah besarnya biaya politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada), adanya kewenangan untuk menyusun/menetapkan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan adanya kewenangan untuk mengatur sumber daya alam yang dimiliki. Tiga faktor ini saling berhubungan dan memperkuat antara satu dengan yang lain untuk mengarah pada tindakan korupsi. Biaya politik tinggi mendorong kepala daerah memaksimalkan kewenangan anggaran dan mengatur sumber daya alam untuk diarahkan kepada kepentingan pribadi dan golongan.

Memenangkan Pilkada butuh biaya banyak hingga puluhan miliar bahkan triliun. Anggaran tersebut didistribusikan untuk membayar partai politik sebagai kendaraan, membiayai tim sukses, dan ongkos marketing politik. Besarnya ongkos politik, membuat para calon kepala daerah menggandeng pengusaha sebagai *finansial supporting*. Pengusaha bermain dalam pilkada memiliki tujuan yang mengarah kepada hukum ekonomi (pendapatan harus lebih banyak dari pengeluaran). Proses seperti ini berpengaruh

kepada kinerja buruk bagi calon kepala daerah yang berhasil memenangkan Pilkada. Kepala daerah akan mengarahkan kebijakan anggaran dan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan pribadi dan pengusaha. Karena itu, banyak kepala daerah yang tersandung korupsi APBD dan tersandung suap oleh pelaku usaha untuk eksploitasi sumber daya daerah yang dimiliki. Apabila persoalan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran yang tidak pernah dijumpai sebelumnya.

### **Butuh desain yang tepat**

Hemat saya, pemerintah khususnya kemendagri harus berupaya serius untuk mendesain kembali bentuk kebijakan otonomi daerah yang lebih tepat. Tiga hal utama yang perlu segera untuk didesain kembali yaitu mekanisme pemilihan kepala daerah dan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang dikehendaki adalah mekanisme yang tidak membutuhkan biaya yang terlalu tinggi namun tetap mengedepankan asas-asas demokrasi. Mekanisme pemilihan kepala daerah yang dapat ditawarkan kembali adalah mekanisme yang pernah diterapkan melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yaitu kepala daerah dipilih oleh DPRD namun DPRD tidak diberi hak untuk menjatuhkan kepala daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan stabil tanpa sandera politik seperti yang terjadi antara tahun 1999 s/d 2004.

Kewenangan kepala daerah harus dibatasi khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan bumi seperti eksplorasi hutan dan pertambangan. Kewenangan eksplorasi hutan dan pertambangan harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah cukup menjalankan urusan-urusan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Hutan dan tambang dinilai sebagai wilayah subur kepala daerah untuk mendapatkan keuntungan pragmatis serta berdampak buruk bagi pembangunan daerah. Selama ini kepala daerah diuntungkan dengan adanya kewenangan pada sektor kehutanan dan pertambangan. Tidak jarang kepala daerah menjadikan sektor

tersebut sebagai sektor bisnis. Kepala daerah menjual sektor tersebut kepada pelaku usaha dengan harga tinggi. Pelaku usaha pun tidak tanggung-tanggung untuk membayar sekalipun menanggung banyak resiko termasuk perlawanan masyarakat.

### **Butuh peran aktif masyarakat**

Selain desain kembali kebijakan otonomi daerah seperti yang dijelaskan di atas, mewujudkan otonomi daerah yang berkeadaban bagi pembangunan daerah dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk mengawal dan memastikan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan baik. Peran aktif masyarakat sangat menentukan kesuksesan otonomi daerah. Tanpa peran aktif masyarakat, otonomi daerah hanya dinikmati dan dimanfaatkan oleh segelintir elit terutama kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah dengan berupaya untuk diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat demi pembangunan daerah yang lebih luas. Selain terlibat dalam penyusunan kebijakan, masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengawasi kinerja, perilaku, dan sikap pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada konteks ini, bukan dalam arti masyarakat melawan pemerintah tetapi tetap bermitra untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan daerah sebagaimana tujuan kebijakan otonomi daerah.

Harian Bhirawa, 01 Agustus 2013

## REFLEKSI MAKNA VISI POLITIK DALAM PILGUB JATIM

Suhu politik dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) pada 2013 lalu cukup memanas. Empat pasangan calon yang resmi maju dalam laga pesta demokrasi lima tahunan itu melakukan kampanye politik dengan berbagai cara termasuk pemasangan iklan melalui media massa, poster, baliho, spanduk, stiker, buku, dan melakukan blusukan dari kampung ke kampung. Mereka mengadu strategi dan metode untuk meraih simpati masyarakat. Mereka mendekati Tokoh-Tokoh Masyarakat, Para Ulama/Kiyai, Pemuda, Tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas), Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Akademisi, Politisi, Tukang Ojek, Pedagang, Petani, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang berpengaruh kuat di Jatim. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mempengaruhi masyarakat Jatim agar memilih mereka untuk mencapai kemenangan menuju orang nomor satu dan dua di Propinsi Jawa Timur periode 2013-2018. Tentu dalam mempengaruhi masyarakat



mereka menawarkan visi dan sejumlah program kerakyatan yang diharapkan masyarakat Jatim.

Masing-masing pasangan calon menawarkan visi strategis untuk membawa Jatim menuju daerah yang berdaya saing, bermartabat, dan berkeadaban dalam segala aspek. Mereka berusaha memahami dan meyakinkan masyarakat Jatim bahwa visi yang mereka usung adalah bentuk dari komitmen dan kepedulian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Hemat saya keempat pasangan calon mengusung visi yang maknanya sama-sama baik bagi kehidupan masyarakat Jatim. Tentunya visi yang diusung masing-masing pasangan calon memiliki landasan dan dasar yang kuat. Mereka berargumen visi yang diusung adalah sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat Jatim.

Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai *incumbent* mengusung visi meneruskan pembangunan Provinsi Jatim menuju propinsi yang berdaya saing dalam segala aspek. Makna yang terkandung dalam visi KarSa ini adalah meneruskan prestasi pembangunan yang telah diukir selama lima tahun kepemimpinannya. Harus diakui, dibawa kepemimpinan pasangan KarSa, Propinsi Jatim meraih sejumlah prestasi yang membanggakan terutama dalam bidang pertanian dan industri serta dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD). Prestasi-prestasi itu perlu dipertahankan dan dikembangkan sehingga dapat memberikan makna positif bagi kehidupan masyarakat Jatim menjadi lebih baik. Kendati demikian, pasangan KarSa mengakui masih terdapat banyak persoalan yang belum tuntas diselesaikan selama lima tahun kepemimpinannya terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu, kedepannya nanti mereka akan melakukan upaya-upaya keras untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Mereka berjanji akan memerangi kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan masyarakat Jatim yang terampil dalam segala bidang pekerjaan.

Pasangan Eggi-Sihat memiliki visi menjadikan masyarakat Jatim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Eggi-Sihat mengusung visi ini bukan tanpa dasar. Mereka memiliki dasar teologis serta historis yang kuat dan bermakna positif bagi masa depan masyarakat Jatim seutuhnya. Menurutnya, taqwa adalah

syarat utama untuk menjadi masyarakat makmur dan sejahtera. Allah SWT tidak akan memakmurkan suatu umat manakala umat itu tidak bertaqwa kepadaNya, sebaliknya apabila tingkat ketaqwaan masyarakat kepada Allah SWT tinggi maka secara langsung Allah SWT menurunkan rezki yang tidak disangka-sangka kepada hambanya yang bertaqwa itu. Inilah alasan teologis Eggi-Sihat mengusung visi Taqwa itu. Selain alasan teologis ini, Eggi-Sihat memiliki alasan historis dalam mengusung visinya itu yaitu Propinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusatnya para alim ulama, para Kiyai, dan para santri, bahkan sejarah propinsi Jatim pernah didiami para wali. Menurutnya akhir-akhir ini propinsi Jatim jauh dari ketaqwaan sehingga problematika kehidupan mewarnai propinsi dibagian timur pulau Jatim ini.

Pasangan Bambang DH-Said mengusung visi menjadi masyarakat Jatim yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Pasangan jempol ini menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai sektor yang harus diperhatikan dan diutamakan. Selain itu, pembangunan masyarakat desa tidak luput dari sorotan si Jempol yang diusung PDIP ini. Penulis melihat, visi yang diusung pasangan Bambang-Said ini terinspirasi dari pengalaman pak Bambang ketika memimpin Kota Surabaya. Program-program yang pernah ia lakukan di Kota Surabaya dinilai sangat sukses dan dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dan surveinya, kebutuhan masyarakat Jatim seutuhnya tidak berbeda jauh dari kebutuhan masyarakat Kota Surabaya. Karena itu, mereka mengusung visi yang serupa ketika memimpin Kota Surabaya dan tentunya dengan desain yang lebih komprehensif sehingga menjangkau semua kepentingan masyarakat Jatim seutuhnya.

Pasangan Khofifah-Herman (Berkah) mengusung visi menjadikan Propinsi Jawa Timur yang Berkah dalam segala bidang terutama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Keberkahan dalam bidang pembangunan secara langsung memberikan makna positif bagi kehidupan masyarakat Jatim. Menurutnya, berkah hanya dapat diraih jika pemimpinnya menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, berdasarkan koridor hukum, dan berkeadilan. Pemimpin harus mampu mendatangkan keberkahan untuk masyarakatnya. Karena itu, pemimpin yang baik adalah syarat dari keberkahan itu. Mereka berkomitmen, jika

memimpin Propinsi Jatim akan menjadi pemimpin yang baik sehingga membawa keberkahan bagi kehidupan masyarakat Jatim seutuhnya.

Mencermati visi yang diusung seperti yang dijelaskan di atas mengarahkan pandangan dan pikiran kita semua untuk menyimpulkan bahwa keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang maju pada laga Pilgub adalah orang-orang yang memiliki mental, komitmen, gagasan, dan jiwa besar yang nantinya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jatim. Karena itu, siapapun keempat pasangan calon tersebut yang memenangkan Pilgub secara langsung akan menjadikan masyarakat Jatim yang makmur dan sejahtera. Persoalannya adalah visi yang diusung masih sebatas kata-kata yang setiap orang dapat saja melakukannya. Visi sangat mudah untuk diungkapkan tetapi sulit untuk mewujudkannya dalam tindakan nyata.

Dalam politik praktis, seringkali politisi menjadikan visi sebagai *lip services* (buah bibir) tanpa makna baik bagi perubahan kehidupan masyarakat. Visi hanya dijadikan sebagai senjata sesaat untuk meraih simpati rakyat. Seringkali visi yang diusung hanya disusun begitu saja tanpa kajian mendalam, pertimbangan rasional, dan tidak berdasarkan data-data *riil* yang terkait dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Visi disusun sepihak oleh para politisi, gagasan dan idenya belum tentu searah dengan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran dari visi itu.

Harapannya di Pilgub Jatim tidak terdapat politisi yang menjadikan visi sebagai alat untuk meraih simpati belaka namun benar-benar menjadikan visi sebagai bagian dari ideologis yang melekat dalam diri, pikiran, dan hati sehingga nantinya dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Mewujudkan visi dalam tindakan nyata dibutuhkan karakter *visioner* dari pemilik visi itu. Karakter *visioner* yang dimaksud adalah karakter yang bertanggungjawab terhadap visi yang dimiliki. Karakter ini akan mendorong seseorang untuk berusaha sekuat tenaga menjadikan visi dalam tindakan nyata, menggerakkan seluruh komponen organisasi untuk berperan aktif dalam menjalankan program pembangunan, dan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Semoga karakter *visioner* di atas dimiliki keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim (KarSa, Enggi-Sihat,

Bambang DH-Said, Berkah,) sehingga pesta demokrasi tidak sekedar pertarungan politik lima tahunan semata namun memberi arti baik untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur seutuhnya.

Okezone.com, 26 Agustus 2013

## REFLEKSI DINAMIKA DEMOKRASI DI PILGUB JATIM

Pelaksanaan Pilgub Jatim 2013 lalu dinilai lebih seru dan menarik jika dibandingkan pelaksanaan Pilgub Jatim 2008 lalu. Titik keseruannya adalah (1) diantara tiga pasangan yang maju pada Pilgub masing-masing memiliki keterkaitan ideologis dengan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi terbesar di Jatim, (2) salah satu diantara tiga pasangan Cagub-Cawagub adalah pasangan *incumbent* utuh yang dinilai sebagai pasangan yang sulit untuk disaingi, dan (3) salah satu diantara tiga pasangan Cagub-Cawagub adalah pesaing *incumbent* yang pernah bersaing ketat pada Pilgub Jatim 2008 lalu. Ketiga titik tersebut memberi warna khusus bagi perkembangan dan dinamika demokrasi di Jatim.

### **NU untuk umat bukan politisi**

Seruan Forum Kiai Kampung Jawa Timur agar politisi tidak menjadikan NU sebagai politik praktis adalah hal yang wajar, dan menurut saya bagian dari bentuk kekecewaan Kiai kampung terhadap

kinerja politisi yang semakin lama semakin tidak menunjukkan sikap politik sesuai prinsip-prinsip ulama, yakni menjadikan politik untuk pemberdayakan umat. Selama ini politisi menjadikan NU sekadar sebagai alat politik pragmatis untuk meraih kekuasaan dan kepentingan pribadi. Sedangkan kepentingan besar NU tidak pernah diperjuangkan dalam bentuk tindakan nyata. NU dibentuk bukan untuk kepentingan politisi tapi untuk umat dan kepentingan bangsa yang lebih luas.

Sebenarnya hidup seseorang atau sekelompok orang termasuk NU tidak terlepas dari kepentingan politik. Bahkan kelahiran NU didorong oleh kepentingan politik para ulama pada saat itu. NU sempat menjadi organisasi politik (Parpol) sebagai tempat para ulama menyatukan pendapat dan kepentingan politik untuk diperjuangkan secara bersama-sama. Namun perlu diakui kepentingan politik elit politik dulu dan sekarang berbeda. Elit politik dulu menjadikan NU benar-benar sebagai mesin politik untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak (kepentingan bangsa dan Islam). Elit politik sekarang menjadikan NU sebagai alat politik pragmatis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hemat saya, warga NU tidak perlu menghindari politik justru aktif dalam politik dengan tujuan untuk kepentingan umat. Upaya-upaya yang harus dilakukan adalah mendukung kader terbaik, peduli, berkarakter, dan berjiwa kebangsaan sehingga NU dapat diberdayakan dalam segala aspek dan dapat mewujudkan cita-cita besar yang dimiliki. Selain itu, politisi harus menjadikan NU sebagai sarana untuk memperkuat komitmen politik mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya.

### ***Incumbent* penentu demokrasi**

Salah satu yang menjadi daya tarik di Pulgub Jatim 2013 adalah majunya Gubernur Jatim (Dr. Soekarwo) bersama Wakil Gubernur Jatim (Drs. Syaifullah) dalam satu pasangan yang kemudian diberi nama KarSa. Majunya *Incumbent* dalam satu pasangan ini menunjukkan hal yang berbeda dari Pemilukada yang lain. Menurut data Kemendagri 90% pasangan kepala daerah mengalami pecah kongsi, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi *incumbent* dengan yang berbeda pasangan. Karna itu, pasangan KarSa mendapat apresiasi dari banyak kalangan. *Stakeholders*

menilai KarSa memiliki manajemen kepemimpinan yang baik, solid, dan memiliki visi-misi yang utuh untuk membangun Propinsi Jawa Timur sebagai daerah yang maju dan berdaya saing pada segala bidang pembangunan. Sepak terjang kepemimpinan KarSa dalam memimpin Jatim selama lima tahun terakhir menunjukkan hal yang positif. Jawa Timur berkembang pesat dalam segala bidang pembangunan terutama industri dan pertanian. Jawa Timur menjadi acuan pembangunan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Atas kesuksesannya itu, pasangan KarSa dinilai pasangan kuat yang sulit untuk disaingi pada Pilgub 27 Agustus lalu.

Sebagai orang nomor satu di Jawa Timur, eksistensi KarSa sangat menentukan kesuksesan implementasi demokrasi di Jawa Timur. KarSa sebagai *incumbent* sebisa mungkin melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan implementasi demokrasi di Pilgub Jatim dengan baik, tanpa persoalan yang dapat mencederai demokrasi yang sebenarnya. Hemat saya, *incumbent* harus memiliki good will untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar politik. Karena itu, *incumbent* harus menghindari atau tidak (1) memanfaatkan birokrasi sebagai alat politik, (2) memanfaatkan anggaran daerah sebagai modal politik, dan (3) melakukan kampanye hitam dengan membungkusnya melalui program atau agenda pemerintah. Apabila incumbent tidak dapat menghindari tiga hal tersebut maka akan menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan dalam demokrasi seperti memicu terjadinya konflik vertikal dan horizontal.

### **Khofifah pesaing kuat *incumbent***

Khofifah seperti yang diberitakan Bhirawa (15/5) memilih mantan Kapolda Jatim, Irjen Pol (Purn) Pol Herman S Sumawiredja sebagai pasangannya dilakukan secara serius melalui proses konsolidasi dan pemetaan politik. Khofifah memilih Herman S Sumawiredja karena dipandang memiliki kekuatan politik khususnya mewakili basis nasionalis. Dengan adanya kekuatan nasionalis, Khofifah akan memiliki kekuatan politik yang lebih kuat dari pada waktu Pilgub Jatim 2008 lalu. Selain kehati-hatian memilih pasangan seperti yang dijelaskan tersebut, Khofifah juga membangun komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh di Jawa Timur, tentunya melalui organisasi

NU. Khofifah berhasil membangun komunikasi tersebut dengan ditunjukkan adanya dukungan politik dan moral dari Kiai Hasyim Muzadi, Gus Sholahuddin, dan bahkan Kiai-Kiai besar bertempat di Mekkah dan Kairo menyatakan sikap untuk mendukung Khofifah menuju kemenangan Pilgub Jatim periode dua ini. Khofifah dapat dikatakan sebagai pesang kuat Karsa sebagai petahan dan pasangan Cagub-Cawagub lain.

Kekuatan politik Khofifah ini dipandang sebagai kekuatan politik yang menentukan kompetisi demokrasi berjalan dengan baik. Khofifah harus menggerakkan pendukungnya dalam bingkai demokrasi, mengajak pendukung untuk berkompetisi dengan *fair*, dan membangun konsolidasi intensif dengan basis massa yang dimiliki (yang mendukung). Khofifah perlu membangun komunikasi intensif dengan basis massa untuk mengajak berpolitik yang baik, tanpa kekerasan dan melakukan tindakan-tindakan lain yang melecehkan demokrasi. Selain itu, Khofifah perlu menghindari "swiping dan manuver politik" dengan menghidupkan kembali penyimpangan Pelaksanaan Pilgub Jatim 2008 seperti yang dipermasalahkan di MK lalu. Manuver seperti ini menguras energi politik yang tidak terlalu memberi dampak untuk kemenangan Pilgub nanti. Khofifah sebagai pesaing lama cukup fokus pada implementasi strategi-strategi inovatif untuk menutupi kelemahan pada pelaksanaan Pilgub 2008 lalu. Dengan upaya yang demikian dinilai demokrasi akan terwujud dengan baik.

Kita semua berharap pelaksanaan Pilgub Jatim dapat berjalan dengan baik dan *fair*. NU sebagai organisasi masyarakat yang berpengaruh di Jatim dapat berperan aktif untuk mengawal Pilgub Jatim menuju demokrasi sejati. Pasangan Cagub-Cawagub khususnya pasangan KarSa dan Khofifah masing-masing memiliki kelebihan. Kelebihan yang dimiliki dapat menjadikan kekuatan untuk mewujudkan demokrasi yang sebenarnya.

Harian Bhirawa, 12 Juni 2013



## DEMOKRASI DESA YANG DIGADAIKAN

**T**anggal 03 Juli 2013 lalu salah satu desa di Kabupaten Kediri Jawa Timur melangsungkan pesta demokrasi. Masyarakat desa terlihat aktif terlibat didalamnya. Mereka menyumbangkan suara emasnya sebagai bukti ketaatannya terhadap demokrasi. Namun pemilihan kepada desa (Pilkades) itu sungguh mengecewakan karena keterlibatan masyarakat didalam pesta bukan karena hati nurani untuk membangun demokrasi namun karena uang. Pada pesta itu, masyarakat desa menjual suaranya dengan kisaran harga antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000. Tampaknya masyarakat desa tidak malu-malu menjual hak konstitusionalnya kepada para Calon. Para Calon pun tidak malu untuk menawarkan harga kepada masyarakat. Tampaknya masyarakat desa salah memahami makna demokrasi yang sebenarnya. Para Calon memanfaatkan situasi ini untuk merusak makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi desa tak ubahnya arena perjudian yang diharamkan.

Fenomena Pilkades seperti di atas adalah satu dari banyak fenomena serupa yang terjadi diberbagai pesta demokrasi desa. Seperti yang diberitakan harian Bhirawa (11/7), rencana Pilkades serentak di Kabupaten Tuban bakal diwarnai politik uang (*money politics*). Politik uang di Pikades ini sengaja diciptakan oleh para calon. Tim pemenangan Pilkades mendesain khusus agar politik uang berlangsung dengan baik, sistimatis, dan tepat sasaran. Tim pemenangan melakukan aksi memberi uang kepada masyarakat. Tim pemenangan bukan menunjukkan visi dan kemampuan calon tetapi menunjukkan kemampuan uang. Uang menjadi alat efektif untuk mempengaruhi masyarakat desa.

Politik uang di Pilkades semakin diperparah adanya permainan para penjudi. Tidak dapat dipungkira setiap kompetisi politik termasuk Pilkades pasti terdapat penjudi. Peran para penjudi semakin memperkuat politik uang berjalan dengan masif. Penjudi membayar masyarakat untuk memilih salah satu calon yang mereka jagokan. Biasanya penjudi dan para calon berkoalisi untuk memperkuat gerakan politik uang. Mereka memiliki kepentingan yang sama yaitu mencapai kemenangan, bedanya adalah penjudi hanya mencari uang sedangkan para calon mencari uang dan kekuasaan.

Rupanya demokrasi ideal seperti yang diharapkan berbagai ilmuwan serta peraturan perundang-undangan hanya berupa konsep emas yang tak mungkin tampak dalam kehidupan nyata. Demokrasi mengajarkan agar masyarakat memilih pemimpin bukan karena uang, kedekatan, dan kepatuhan. Demokrasi mengajarkan memilih pemimpin harus berdasarkan asas keadilan. Menurut Robert A. Dahl demokrasi memberi peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis termasuk didalam pemilihan kepala desa. Demokrasi menghendaki segenap masyarakat untuk menjalankan politik secara baik yang berasaskan pada nilai keadilan, persamaan, kebebasan, kejujuran, ketaatan hukum, dan bermartabat.

Budaya politik masyarakat belum bisa mengimbangi makna demokrasi yang sebenarnya. Masyarakat masih kuat dengan budaya penghormatan terhadap uang daripada penghormatan terhadap kapasitas dan kapabelitas seseorang. Budaya politik ini

secara langsung melahirkan pemimpin yang tidak memiliki visi dan kemampuan untuk mengelola institusi yang dipimpinnya. Pemimpin yang tidak memiliki visi secara langsung tidak mampu membawa pembangunan desa menuju yang lebih baik, justru sebaliknya.

Akhir-akhir ini menjamur kepala desa yang melakukan tindakan korupsi program pembangunan desa seperti program beras miskin, program bantuan langsung tunai, program nasional pemberdayaan masyarakat, dan berbagai program-program lain. Kejaksaan Negeri Bojonegoro, misalnya, telah menangani sembilan kepala desa yang tersangkut kasus korupsi. Tujuh kades tersandung kasus prona, satu kasus Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan satu kasus PNPM. Korupsi kepala desa juga terjadi di Cianjur Jawa Barat, yakni 11 orang kepala desa di Kecamatan Sukaresmi diduga melakukan penyelewengan beras miskin (raskin) tahun 2012. Korupsi kepala desa berdampak luas pada pembangunan desa. Kendati banyak program pembangunan untuk desa tetapi tetap saja masyarakat desa dikategorikan sebagai tempat masyarakat miskin tertinggi.

Fenomena politik uang di desa ini perlu diperhatikan secara serius. Perlu ada upaya-upaya sistematis dan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengkaji mewujudkan demokrasi desa yang lebih baik, bermartabat, dan berkeadaban. Hemat saya upaya-upaya yang harus dikedepankan pemerintah dan masyarakat sipil adalah menciptakan budaya politik demokratis melalui pendidikan, membentuk dan menanggakan peraturan hukum untuk menjamin demokrasi berlangsung dengan baik.

### **Penguatan Pendidikan Politik**

Masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media massa perlu memberikan perhatian serius untuk membangun budaya politik masyarakat desa yang demokratis dan berkeadaban. Budaya politik tersebut dapat dibangun melalui pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan syarat utama untuk membangun demokrasi. Menurut Amril (2004) fungsi pendidikan politik adalah (1) merubah atau membentuk tata laku pribadi atau individu, (2) membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan

politik, (3) proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatan, dan (4) meningkatkan kemampuan individu untuk mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat. Karena itu, dengan pendidikan politik diharapkan masyarakat desa memiliki pemahaman politik yang baik didalam memilih kepala desa.

### **Butuh Perda demokratis**

Pemerintah daerah harus mencegah praktik buruk demokrasi desa dengan membuat peraturan hukum atau peraturan daerah (Perda) tentang pencegahan dan sanksi politik uang. Keberadaan Perda ini sangat penting untuk membangun demokrasi desa. Peraturan hukum dibuat harus berasaskan nilai-nilai demokrasi dengan melibatkan semua stakeholder terkait sehingga melahirkan Perda yang bertanggungjawab dan dapat diterima oleh semua unsur masyarakat desa. Hal-hal yang wajib diatur dalam Perda adalah sanksi bagi yang melakukan politik uang, mekanisme pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pilkades, pembatasan biaya kampanye, mekanisme pelaporan, dan perlindungan terhadap pelapor. Perda yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sipil. Pada tahap ini masyarakat sipil harus berperan aktif untuk memastikan Perda dapat dilaksanakan dengan baik.

Upaya-upaya di atas, adalah sedikit dari banyak upaya lain yang harus dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadaban sehingga dapat memberi makna positif bagi pembangunan desa menjadi lebih baik, berdaya saing, dan berkemajuan. Diharapkan kedepannya nanti masyarakat desa dapat memanfaatkan demokrasi dengan sebaik-baik mungkin sehingga melahirkan pemimpin desa yang bertanggung jawab, berintegritas, moralitas tinggi, dan memiliki kemampuan untuk mengelola program pembangunan desa dengan baik dan benar. Saatnya masyarakat desa memiliki pengetahuan dan komitmen tinggi untuk berdemokrasi dengan baik. Dan yang lebih penting adalah elit desa harus memiliki komitmen untuk membangun demokrasi dan mengedepankan asas-asas hukum sebagai landasan berpolitik.

Harian Bhirawa, 03 Juli 2013

## ADIPURA KENCANA DAN WAJAH LINGKUNGAN KOTA

Setelah dua dekade Adipura Kencana lepas dari genggamannya Kota Malang, kini Kota Malang patut berbangga karena pada Tahun 2013 ini berhasil memboyongnya kembali. Penghargaan tertinggi untuk kebersihan lingkungan berupa Piala Adipura Kencana tersebut diserahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 10 Juni 2013 yang lalu. Berbeda dengan mayoritas daerah lain yang menerima penghargaan Adipura tanpa label kencana, Kota Malang merupakan 1 dari 7 daerah yang menerima Adipura Kencana. Untuk memperolehnya tentu membutuhkan perjuangan yang luar biasa dari seluruh pihak, pemerintah kota, swasta, dan masyarakat. Kebanggaan atas keberhasilan tersebut tentu tidak harus membuat pemerintah kota dan seluruh pihak hanyut dalam kegembiraan dan terlenu untuk mempertahankan wajah kota yang ramah lingkungan.

Berbagai daerah yang saat ini telah memperoleh anugrah Adipura menargetkan dapat meraih

Adipura Kencana pada tahun 2014 atau tahun-tahun berikutnya. Sementara peraih Adipura Kencana tentu tetap berharap dapat terus memperthankannya. Menurut hemat saya hal ini adalah sesuatu yang wajar, ketika sebuah kerja keras dan prestasi seperti halnya dalam kebersihan dan lingkungan kota yang yang diraih sebuah kota mendapatkan penghargaan sebagaimana Piala Adipura Kencana. Adalah sebuah keniscayaan setiap daerah berlomba untuk menjadikan wajah kotanya menjadi kota hijau (*green city*) dan ramah lingkungan. Ketika sebuah kota telah memiliki wajah lingkungan yang ramah pada gilirannya setiap warga yang tinggal di dalamnya akan terpenuhi semua haknya untuk mendapat kehidupan layak.

### **Penghargaan Bukan Tujuan**

Hal yang perlu diingat oleh pemerintah kota dan semua pihak tentunya adalah tidak menjadikan perolehan penghargaan tersebut sebagai tujuan. Apalah arti sebuah penghargaan jika kenyataan di lapang tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Oleh karena itu, Kota Malang harus mampu membuktikan pada publik bahwa apa yang dirainya yakni Piala Adipura Kencana memang sebanding dengan kondisi lingkungan Kota Malang. Bagaimana dengan penilaian pihak tertentu, sebut saja Walhi Jawa Timur yang menilai bahwa Kota Malang tidak layak menerima penghargaan Adipura Kencana. Penilaian Walhi tentu bukan tanpa alasan, mengingat realitas di lapang, diakui atau tidak bahwa telah terjadi penurunan kualitas lingkungan di Kota Malang diantaranya alih fungsi lahan yang merusak lingkungan dan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penilaian Walhi tentu dapat dijadikan instropeksi bagi pemerintah kota, sebagaimana dikemukakan Presiden SBY dalam pidato sambutan penganugrahan Adipura Kencana untuk menjadikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) sebagai mitra. Artinya presiden mengajak kita untuk terbuka dan menerima kritik yang konstruktif. Jika pemkot menyadari bahwa kerja kerasnya bukan semata karena keinginan untuk memperoleh penghargaan tentu akan dapat menerima semua masukan dari manapun untuk kelestarian lingkungan kota.

## Kelayakan Penghargaan

Penilaian atas kelayakan Kota Malang memperoleh penghargaan Adipura Kencana, tentu ada di pemerintah pusat. Saya percaya bahwa pemerintah telah memiliki instrumen. penilaian yang sangat ketat dan selektif. Namun tidak pungkiri ketika ada pihak yang mempertanyakan atas layak tidaknya sebuah kota memperoleh penghargaan bergengsi tersebut. Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dibuktikan oleh kota-kota penerima penghargaan Adipura kencana ini yaitu *pertama*, bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati adalah bekerja dengan tulus ikhlas yang acapkali sangat sulit dilakukan. Betapa tidak, pemerintah kota adalah institusi abdi masyarakat, namun dalam praktiknya sarat dengan kepentingan. Pemkot tidak bekerja dalam ranah kosong atau ruang hampa, namun dikelilingi oleh berbagai kepentingan. Termasuk dalam hal menanta wajah kota yang pro lingkungan. Tarik menarik antara kepentingan investor dan kepentingan publik seakan tidak pernah habis. Resistensi warga atas pilihan kebijakan pemkot selalu saja terjadi. Publik hanya perlu bukti bahwa apa yang dipilih dan dilakukan pemkot adalah untuk kepentingan warga kota bukan untuk kepentingan yang lain.

*Kedua*, terus berinovasi. Kota adalah wilayah yang semakin hari semakin sarat beban. Daya tarik kota telah menjadikannya seperti magnet yang menarik warga pedesaan dan pinggiran merangsej ke kota. Akibatnya kota harus berfikir keras melayani seluruh keperluan warga kota. Pembangunan fisik seperti perumahan, infrastruktur, dan pusat perdagangan pada gilirannya tidak dapat terhindarkan. Hal ini berakibat pada berubahnya fungsi RTH menjadi bangunan. Deviasi pemanfaatan lahanpun terjadi dimana-mana. Oleh karena itu diperlukan pemerintah yang inovatif. Pemkoat yang dapat memenuhi kebutuhan warga kota tanpa harus kehilangan RTH dan merusak lingkungan. Pemkot inovatif, tidak harus terjebak pada kungkungan politis yang menilai segala sesuatu secara pragmatis, namun pemkot yang mampu menghadirkan terobosan untuk membongkar kejumudan kota menjadi kota ramah lingkungan dan berkemajuan.

*Ketiga*, adalah pemkot yang menggerakkan pelopor lingkungan. Sebagaimana konsep *Good Urban Goveenance*, pemkot akan dapat berhasil melaksanakan kebijakan kotanya jika didukung

olehkepeloporan warga. Pelopor lingkungan adalah sosok individu atau masyarakat yang tanpa pamrih mengelola lingkungan agar tetap terjaga. Pengelolaan sampah dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan RTH privat sebagaimana yang dilakukan warga di wilayah sukun, Tlogomas dan di beberapa wilayah lain merupakan contoh pelopor lingkungan yang harus terus digerakkan, "virus" kepeloporan ini harus terus ditularkan.

Pemerintah kota memiliki *power* untuk menyebarkan "virus" kepeloporan tersebut. Adalah mustahil jika pemerintah bekerja sendiri dalam mengelola kota.. Akhirnya kita semua berharap Pemkot Malang akan dapat tetap mempertahankan Adipura Kencana seiring dengan kebersihan dan pelestarian kota.



## MALANG KOTA WARISAN BUDAYA DUNIA?

**T**idak lama lagi UNESCO, organisasi PBB yang mengurus pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan akan segera mengumumkan penilaiannya terhadap kota yang layak mendapat predikat Kota Warisan Budaya Dunia. Kota Malang merupakan salah satu dari 30 kota di Indonesia yang dinilai oleh UNESCO. Akankah Kota Malang dapat lolos untuk mendapatkan predikat Warisan Budaya Dunia tersebut? Jika dapat lolos tentu sangat membanggakan, karena sebagai kota Warisan Budaya Dunia berarti Kota Malang berhasil mempertahankan karakternya sebagai kota peninggalan kolonial dan mempertahankan cagar alam dan budaya. Beberapa kriteria yang ditetapkan oleh UNESCO dalam penilaiannya terhadap kota Warisan Budaya Dunia diantaranya adalah: 1) terjaganya cagar alam dan budaya setempat dan kebijakan pemerintah atas kelestariannya; 2) desain tata ruang kota yang berpihak pada perlindungan publik; 3) tata ruang yang berpihak pada kepentingan publik,

ruang terbuka hijau (RTH), Gedung Olah Raga (GOR), alun-alun, ijin mendirikan pembangunan gedung-gedung baru, dan 4) terjaganya pasar tradisional.

### **Cagar Alam dan Budaya tersisa**

Mencermati kriteria tersebut, saya berharap-harap cemas atas kemungkinan Malang dapat lolos sebagai Kota Warisan Budaya. Berharap karena berbeda dengan kota-kota lain, Kota Malang telah memiliki icon tersendiri seperti kota peninggalan Koloial Belanda, tempat peristirahatan, dan letaknya yang sangat strategis. Sungguh beruntung Kota Malang yang secara alamiah telah memiliki modal atau potensi struktur alam dan kota yang sangat indah dan teratur. Sebagaimana dikemukakan Herman Thomas Karsten (1917), seorang arsitek dan ahli tata kota dari Belanda, telah merancang Kota Malang sebagai kota taman (garden city). Karsten beranggapan bahwa kota adalah suatu organisme hidup yang terus tumbuh. Dalam rencana pengembangan kota, Karsten menganggap penting keberadaan taman-taman kota serta ruang terbuka,

Dengan konsep garden city, Kota Malang oleh Karsten tidak dirancang secara parsial, tetapi secara lengkap melalui Bouwplan I–VIII antara Tahun 1917–1935. Oleh Karsten, Kota Malang dikembangkan dalam proposisi masiv–void sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan yang menyatu untuk mewujudkan ruang pemukiman yang nyaman dan untuk memwadahi aktivitas penghuninya. Bahkan rancangan kota Malang ini pernah dikirim oleh Karsten pada pameran di Paris pada tahun 1937. Hingga saat ini Kota Malang masih memiliki taman Kota Alun-Alun Tugu di depan Kantor Walikota Malang yang sampai saat ini merupakan landmark Kota Malang dan tanaman palem raja di sepanjang boulevard di Jalan Ijen yang sangat asri dan yang menjadi area primadona di Kota Malang sejak jaman dulu hingga sekarang. Di Jalan Ijen itu pula dan kawasan Kayutangan berdiri pemukiman dengan desain rumah jaman kolonial, meski beberapa berubah. Pada awal Kota Malang ini lahir, menurut Handinoto dan Soegihargo (1996) dalam bukunya yang berjudul Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang, alun-alun Kota Malang sebagai pusat kota memiliki peran yang sangat kuat. Pada jaman dulu, hampir semua kegiatan

produksi ekonomi terkumpul di pusat kota ini.

Di sisi lain, saya merasa sangat cemas terhadap perkembangan Kota Malang yang cenderung kehilangan karakternya. Malang tidak ubahnya kota-kota besar lain yang sarat dengan beton, penat, macet, bahkan banjir. Saat ini seiring dengan pertumbuhan penduduk dan dinamika perkembangan ekonomi, bangunan-bangunan di wilayah Kota Malang telah menyebar ke berbagai arah. Walaupun demikian, kawasan yang berada di pusat kota, yaitu Kecamatan Klojen, tetap menjadi pilihan menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya, di samping wilayah di Kecamatan Sukun, dan di Kecamatan Blimbing. Kawasan yang ada di kecamatan yang lain kurang diminati oleh investor, seperti kawasan di Kecamatan Kedungkandang. Hal ini dapat dipahami, karena dalam perspektif investor pilihan lokasi di tengah kota akan memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan di pinggiran kota.

Pembangunan Kota Malang dengan demikian telah mengarah pada kapitalisme yang cenderung mengejar kepentingan ekonomi sesaat atau keuntungan dalam jangka pendek. Pembangunan mal, pertokoan, dan perumahan elit, seolah lebih menjadi pilihan utama dalam kebijakan pembangunan kota daripada pilihan untuk mempertahankan ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman, hutan kota dan jalur hijau. Bangunan-bangunan kapitalisme yang terus tumbuh tersebut menjadi salah satu penyebab berkurangnya kesejukan dan kenyamanan Kota Malang. Kota Malang telah menjadi daerah urban dengan kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum, dan sosial, dan industri. Bahkan dalam tahun-tahun terakhir ini tengah berdiri tiga apartemen dan pasar modern yang sedikit banyak tentu akan berpengaruh/mengancam keberadaan pasar tradisional Dinoyo, Blimbing, dan Gadang. Sementara keberadaan pasar tradisional adalah mencirikan karakter sebuah kota yang layak disebut Kota Warisan Budaya Dunia.

## **Mengembalikan Karakter Kota**

Mengembalikan karakter Kota Malang sebagaimana yang sempat dirancang oleh Karten tentu membutuhkan komitmen dan perjuangan yang kuat dari semua stakeholder. Faktanya Kota

Malang telah berubah jauh dari wajah aslinya. Hal ini tentu dapat dipahami, mengingat sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, dia harus menyangga beban kebutuhan kota yang sangat berat. Namun sesungguhnya hal itu tidak dapat dijadikan alasan, seberat apapun beban kota jika dirancang dengan baik dan semua pihak mematuhi aturan yang ada saya yakin kenyamanan kota akan tetap terjaga. Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan adalah kesadaran semua pihak terutama pemerintah kota sebagai penentu pilihan kebijakan kota. Akhirnya semoga Malang sebagai Kota Warisan Budaya dapat terwujud.

## WAJAH BARU PEMIMPIN KOTA MALANG

Rasa penasaran warga Kota Malang tentang siapa kiranya pasangan calon (paslon) yang akan memimpin Kota Malang 5 (lima) tahun mendatang terjawab sudah. Meskipun secara formal paslon yang berhak memimpin Kota Malang menunggu pengumuman resmi dari KPUD Kota Malang, namun berbagai lembaga survai telah mengumumkan rangking perolehan suara menyusul pelaksanaan pilkada 23 Mei 2013. Hasil quick count FISIP Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan paslon No. 1 (Dwi-Uddin), 5,44%; No.2 (SR-MK), 21,61%; No.3 (Dadi), 18,08%; No. 4. (Raja), 2,39%; No.5 (DOA), 3.64%; dan No. 6 (AJI), 48,83%. Berdasar hasil quick count tersebut bahwa Paslon AJI unggul telak, sementara perolehan suara rangking ke-2 dan ke-3 diduduki pasangan SR-MK dan DADI. Hasil hitungan lembaga survey lain juga menunjukkan hasil yang sama yakni dengan posisi tiga besar AJI, SR-MK, dan DADI. Lingkaran Survey Indonesia (LSI), dan Lapora UB, melansir angka 46-48% untuk paslon

AJI dan urutan ke-2 dan ke-3 sama yaitu paslon SR-MK dan DADI.

Hal menarik yang perlu dicermati adalah mengapa AJI mampu mengalahkan paslon lain terutama 2 kekuatan besar SR-MK dan DADI. Pada awalnya saya memperkirakan yang akan bertarung *head to head* adalah cawali SR dan HP. Hal ini berdasar pengalaman pilkada Kota Malang sebelumnya dimana pemilih kota Malang sebagian besar merupakan pemilih loyalis PDIP. Namun mendekati pelaksanaan pilkada terlihat fakta nama Anton tampak mulai menguat. Meskipun tingkat popularitasnya tidak sepopuler SR dan HP, namun kehadirannya dapat menarik perhatian sebageian warga Kota Malang.

Tingkat popularitas memang tidak harus berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas., terlebih dalam dunia politik. Dilihat dari tingkat popularitas paslon DADI sangat populer terutama bunda HP. Jauh sebelum KPUD mengumumkan paslon peserta pemilukada Kota Malang nama Bunda HP telah demikian populer melalui sosialisasi di ruang publik, media massa, maupun berbagai aktivitas yang dilakukan di masyarakat. Demikian pula dengan nama SR. Kader PDI yang telah berpengalaman politik di tingkat daerah hingga sebagai anggota DPR-RI namanya telah demikian populer di warga Kota Malang. Tak pelak berbagai hasil survey sebelum pelaksanaan pilkada acapkali memposisikan ke dua cawali tersebut dalam posisi unggul secara bergantian. Meski tidak harus percaya pada hasil survey seratus persen, jika memang hasil survey tersebut benar, hal ini mengindikasikan keduanya memiliki peluang besar untuk memimpin Malang. Pada hari-hari mendekati pelaksanaan pilkada fenomena Anton mulai muncul. Terlebih setelah hasil survey LSI menempatkan Anton pada urutan terunggul. Apakah ada indikasi hasil survey perbengaruh terhadap pilihan warga terutama *swing voters*, yang jumlahnya diperkirakan tidak kurang dari 30%, hal ini bisa saja terjadi.

## **Bias Gender**

Diakui atau tidak pergumulan dan keterlibatan perempuan di bidang politik hingga hari ini masih dihadapkan pada pro dan kontra. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa politik merupakan ranah yang keras dan merupakan dunia laki-laki. Jangankan kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tidak

sedikit masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih memposisikan perempuan tabu di bidang politik. Secara sosiologis acapkali perempuan dibatasi oleh konstruksi sosial masyarakat yang memandang perempuan tidak elok sebagai pemimpin politik. Ironisnya perempuan juga seringkali memposisikan dan membatasi dirinya di dunia politik, terlebih perempuan untuk menjadi pemimpin politik seperti walikota.

Bagi mereka yang menolak pemimpin perempuan akan beralasan sepanjang masih ada laki-laki yang dapat dipilih sebagai pemimpin, maka mereka akan cenderung memilih laki-laki. Hingga saat ini jumlah pemimpin perempuan sebagai kepala daerah sangatlah minim. Perempuan yang mampu mengungguli laki-laki dalam pilkada di berbagai daerah menurut hemat saya karena mereka mempunyai kemampuan "luar biasa". Tanpa bermaksud mengatakan SR dan HP tidak memiliki kemampuan luar biasa, faktanya warga kota Malang tidak memposisikan mereka berdua pada urutan pemenang. Jika dilihat dari visi-misi strategi politik, dan mesin politik ketiga paslon AJI, SR-MK, dan DADI relatif sama, namun AJI ditinggalkan karena mereka laki-laki.

### **Terpecahnya suara PDIP**

Di sisi lain, majunya SR dan HP dalam pilkada kali ini, menurut saya justru memberikan sumbangan akan keunggulan AJI. Betapa tidak, PDIP memberikan rekomendasi kepada SR, yang sesungguhnya juga diharapkan oleh HP, berakibat pada perebutan pangsa konstituen. Sebagaimana kita tahu akhirnya HP menggunakan kendaraan politik lain yakni PAN dan Golkar. Selama ini kita mengenal pemilih PDIP adalah kelompok pemilih yang loyal, namun dengan majunya SR dan HP mau tidak mau suara PDIP terpecah ke SR dan HP. Loyalis PDIP yang condong pada Peni, suami HP sangat besar kemungkinannya memilih HP. Di samping itu pencalonan SR-MK juga kurang menguntungkan mengingat keduanya berasal PDIP, sehingga menutup peluang bagi pemilih di luar PDIP yang loyal terhadap partai. Sementara DADI tampaknya juga tidak cukup mendapat sokongan secara penuh dari kendaraan politik barunya. Sehingga pada gilirannya pasangan SR-MK dan DADI seolah berebut pada periuk yang sama.

## **Saat yang tepat**

Kemunculan paslon AJI pada pilkada Kota Malang saat ini rupanya merupakan saat yang tepat. Warga Kota Malang spertinya berharap adanya perubahan dan suasana lain atas pengeloan kota di bawah pimpinan Peni S. Tentu telah banyak presatsi yang diraih oleh Kota Malang selama 2 periode kepemimpinannya, namun tidak sedikit pula pekerjaan rumah yang masih harus di selesaikan. Publik tentu berharap kota Malang berubah kearah yang lebih baik dengan pemimpin kota yang baru. Sebagaimana janji paslon AJI yang akan membawa perubahan kota Malang dan memperbaiki pelayanan publik. Disamping itu jika AJI memimpin Kota Malang perlu merangkungul semua pihak, termasuk lawan politik dan warga yang tidak memilih (golput) karena berbagai alasan. Selamat bekerja pemimpin baru kota Malang, semoga Kota Malang semakin jaya.

Malang Post, 22 Oktober 2013



## MERINDUKAN PEMIMPIN YANG KUAT

Tahun 2013 ini benar-benar sebagai tahun politik, berbagai daerah telah dan akan melaksanakan pilkada pemilihan bupati, gubernur dan juga pemilihan kepala desa. Dari proses pemilihan inilah telah lahir dan akan lahir pemimpin politik di masing-masing daerah. Kadang saya merasa cemas, mungkinkah para pemimpin politik tersebut benar-benar dapat diandalkan dan kuat dalam memimpin rakyat di daerahnya masing-masing. Mengingat pergumulan politik dalam merebut kekuasaan acapkali masih jauh dari demokrasi yang sesungguhnya. Biaya demokrasi terlalu mahal, saling telikung diantara para kandidat, konflik antara tim sukses, *money politic* dan berbagai pelanggaran dalam kampanye dan saat pemilihan terjadi dimanamana. Akibatnya pemimpin terpilih acapkali masih harus menghadapi serangan-serangan dari lawan politiknya. Untuk itu kepemimpinan yang kuat merupakan keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Berbagai persoalan di negeri ini tidak tertangani dengan baik karena tidak hadirnya negara dan pemimpin yang kuat. Pilihan kebijakan sarat politik, carut marut UAN, maju mundur kebijakan BBM, korupsi merajalela, belum lagi kasus perbudakan buruh di perusahaan panci Tangerang, runtuhnya tambang PT Freport, konflik penganut Syiah di Madura adalah sedikit contoh betapa pemimpin tidak hadir, negara tidak kuat dalam mengendalikan semua permasalahan tersebut. Negeri ini seolah berjalan tanpa nahkoda, rakyat bercerai berai masing-masing mengayuh perahunya yang kecil dan rapuh berlayar tidak tentu arah. Buya Syafi'i Ma'arif mantan Ketua PP Muhammadiyah, dalam sebuah kesempatan seminar di Jakarta beberapa waktu yang lalu mengemukakan bahwa saat ini diperlukan pemimpin yang kuat, cekatan dan tegas untuk membawa Indonesia berkemajuan.

Menurut hemat saya apa yang disampaikan Buya Syafi'i tersebut tidak berlebihan, mengingat berbagai persoalan bangsa ini seolah berlarut-larut tanpa kepastian. Tidak sedikit kasus yang tidak terselesaikan dan pada gilirannya hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu dan tertutup oleh isu lain. Rakyat rasanya sudah sangat terbiasa dengan berbagai persoalan yang melilit mereka, mulai dari kurang terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan hingga persoalan banjir, macet, rusaknya lingkungan. Sementara di sisi lain para elit pemimpin asyik sendiri berbantah-bantahan dan berkonflik atas pilihan-pilihan kebijakan yang acapkali jauh dari apa yang dibutuhkan rakyat. Politisasi kebijakan seolah sudah menjadi sebuah kewajaran. Kapankah pemimpin negeri ini menengok rakyatnya kembali?

### **Kuat tidak berarti otoriter**

Pemimpin yang kuat menurut hemat saya pemimpin yang mampu memegang kendali kemana rakyat dan bangsa ini akan dibawa. Oleh karena itu, pemimpin kuat adalah pemimpin yang *pertama*, kuat memegang amanah. Memimpin pada hakekatnya adalah amanah. Atas kehendak Allah Swt, seseorang menduduki jabatan tertentu untuk memimpin. Rakyat memilih hanyalah tangan-tangan yang dipinjam Allah Swt untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Sayangnya banyak pemimpin politik kurang memahami atau pura-pura tidak memahami akan hal ini.

Sehingga ketika seseorang terpilih sebagai pemimpin politik seolah hal itu adalah hasil jerih payah diri, tim sukses dan pendukungnya, padahal dibalik itu semuanya ada kekuatan yang maha kuat, Allah Swt. Kasus korupsi yang marak sebut saja terakhir kasus korupsi daging impor dan penyimpangan perilaku pemimpin menandakan tidak amanahnya seorang pemimpin. Kemana hati dan pikiran para pemimpin yang seharusnya menjadi suri tauladan. Benarkah mereka semua telah melupakan sabda Rasulullah Muhammad Saw, bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya?

*Kedua*, kuat berhadapan dengan pihak-pihak yang akan merongrong eksistensi dan keberlanjutan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin yang tegas, cekatan, dan memiliki posisi tawar yang kuat. Betapa tidak, karena peradaban berdemokrasi yang relatif masih rendah, pemimpin terpilih harus terus waspada terhadap lawan-lawan politiknya. Kedewasaan berpolitik bangsa ini masih harus ditingkatkan. Banyak kasus pilkada yang berujung pada gugatan pasangan calon (paslon) yang kalah dapat dijadikan indikasi kurangnya kedewasaan berpolitik. Terlepas dari siapa yang benar dan salah, ketika pelaksanaan pilkada tidak dapat diterima semua pihak tentu ada yang salah dalam prosesnya. Lebih parahnya lagi gugat mengungkat tersebut terus berlangsung meskipun pada gilirannya pasangan tertentu telah ditetapkan sebagai pemenang.

Bagaimana seorang pemimpin dapat dengan konsentrasi melaksanakan tugas dan menentukan pilihan kebijakan dan program dengan baik jika harus dikisruh oleh pihak-pihak yang selalu tidak puas. Akibatnya dalam tataran pemerintahan acapkali terjadi relasi pemerintah dan dewan kurang harmonis, mereka seolah saling berhadapan-hadapan yang seharusnya bersinergi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Di sisi lain pemimpin harus menyadari bahwa tidak semua kebijakan dapat didukung oleh semua elemen. Tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua pihak. Terkait hal ini, meminjam istilah Fukuyama, negara harus kuat dalam melaksanakan fungsinya. Negara melalui pemimpinnya harus mampu melaksanakan fungsi minimal pelayanan publik bagi warganya, termasuk pada mereka yang tidak mendukungnya. Demi kemaslahatan warganya pemimpin harus berani menjadi

bamper dan garda terdepan.

*Ketiga*, kuat dari berbagai godaan duniawi, harta, tahta, dan wanita. Ketiga godaan ini benar-benar menjadi ujian kekuatan seorang pemimpin. Kecintaan terhadap duniawi adalah hal yang wajar, karena setiap manusia pada hakekatnya memiliki potensi tersebut. Namun jika kecitaannya terhadap dunia tersebut melampaui batas dan diperoleh melalui jalan yang tidak semestinya tentu hal ini akan menjadi malapetaka. Kesilauan terhadap urusan duniawi tersebut tidak sedikit telah membutakan mata dan hati para pemimpin negeri ini. Betapa banyak para pemimpin negeri ini yang tersandung kasus korupsi, belum lagi korupsi yang terkait dengan wanita. Inikah gaya baru korupsi di negeri ini.

Akhirnya kita semua berharap semoga mimpi kita semua untuk memiliki pemimpin yang kuat dan mengantarkan pada tercapainya tujuan bangsa dan negara dapat terwujud.

Harian Bhirawa, 22 Juli 2013



## SUMBER TULISAN

- Jainuri, *Krisis Moral Politik Politisi*, Okezone.com, 12 Juli 2013
- Jainuri, *Pancasila di Tengah Problematika Bangsa*, Okezone.com, 13 Mei 2013
- Jainuri, *Golput Bukan Keinginan Rakyat*, Okezone.com, 12 September 2013
- Jainuri, *Korupsi Institusi Politik Demokrasi*, Okezone.com, 23 September 2013
- Jainuri, *Menakar Kualitas Pemilu 2014*, Okezone.com, 20 Januari 2014
- Jainuri, *Korupsi dan Otonomi Daerah*, Harian Bhirawa, 01 Agustus 2013
- Jainuri, *Refleksi Makna Visi Politik Dalam Pilgub Jatim*, Okezone.com, 26 Agustus 2013
- Jainuri, *Refleksi Dinamika Demokrasi di Pilgub Jatim*, Harian Bhirawa, 12 Juni 2013

Jainuri, *Demokrasi Desa yang Digadaikan*, Harian Bhirawa, 03 Juli 2013

Tri Sulistyaningsih, *Menuju Negara Konstruktif*, Harian Bhirawa, 20 Agustus 2013

Tri Sulistyaningsih, *Mencermati Implementasi Proyek e-KTP*, Harian Bhirawa, 29 Agustus 2013

Tri Sulistyaningsih, *Adipura Kencana dan Wajah Lingkungan Kota*, pemerintahan.umm.ac.id, 01 September 2013

Tri Sulistyaningsih, *Malang Kota Warisan Budaya Dunia?*, Buletin Prodipnews Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, 22 Desember 2013

Tri Sulistyaningsih, *Wajah Baru Pemimpin Kota Malang*, Malang Post, 22 Oktober 2013

Tri Sulistyaningsih, *Demokrasi Antara Popularitas dan Kualitas*, Harian Bhirawa, 20 Desember 2013

Tri Sulistyaningsih, *Nirmoral dan Integritas Pejabat Negara*, Harian Bhirawa, 01 Juni 2013

Tri Sulistyaningsih, *Merindukan Pemimpin yang Kuat*, Harian Bhirawa, 22 Juli 2013

Salahudin, *Dinasti Politik Mengancam Demokrasi*, Harian Suara NTB, 01 September 2013

Salahudin, *Partai Politik Mengabaikan Demokrasi*, Harian Suara NTB, 22 Desember 2013

Salahudin, *Berharap Kinerja Baik Partai Politik*, Harian Suara NTB, 02 Maret 2013

Salahudin, *Eksplotasi Kemiskinan dalam Pemilu*, Harian Bhirawa, 22 oktober 2013

## TENTANG PENULIS



**Drs. Jainuri, M.Si.** lahir pada tahun 1964 di Malang. Pendidikan terakhir penulis Magister Otonomi Daerah dan Politik Lokal Universitas Gadjad Mada (UGM). Penulis aktif melakukan penelitian, diantaranya “Volalitas dan Loyalitas Pemilih Partai Politik di Kota Malang (Studi di Partai Politik Yang Mendapat Kursi di DPRD Kota Malang)”, “Komparasi: Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat Kota Malang Dalam Pileg Tahun 2009”, “*One Men One Vote Versus One Delegation One Vote* (Analisis tentang kemacetan Pemilihan Ketua dan Anggota formatur di Muktamar Pemuda

Muhammadiyah ke XIV di Jakarta)”, Model Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan APBD Kota Malang”.

Penulis aktif melakukan program pengabdian, diantaranya: “Fasilitasi Berdirinya Ranting Muhammadiyah Kelurahan Tunjungsekar dan Tasiknadu Kecamatan Lowokwaru (Ketua TIM)”, “Fasilitasi Refreshing Perkaderan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang (Anggota TIM)”, “Fasilitas Taraining Of Trainer (TOT) Bagi Pemimpin ORTOM Muhammadiyah Se Malang Raya”, “Rintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aisyiyah dau Malang”.



Penulis aktif menulis buku. Buku yang pernah dipublikasikan diantaranya: "Pergulatan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal", "Pergumulan Politik Antar Elit Partai di Aras Lokal. (Menguak Lahir dan Dinamika PAN Kota Malang)", ""Nidzhom" The Never Ending Spirit (Kontributor)", "Percikan Pemikiran Tentang Sosiologi Politik (Kontributor)".

\*\*\*



**Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si** adalah dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UMM. Lahir di pekalongan, 22 Juni 1964. Pendidikan setingkat sarjana diselesaikan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang (Administrasi Negara), Master di Universitas Airlangga (Sosiologi Politik), dan Doktor di Universitas Brawijaya (Administrasi Negara). Beberapa Penelitian yang pernah dilakukan antara lain; (1) Model Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berbasis Demokratisasi Peran Aktor Sebagai Upaya Kota

Berkelanjutan di Malang (2009), (2) Pemahaman Multikulturalisme Masyarakat dalam Pengelolaan Konflik Sosial dan Politik ( Studi Pada Masyarakat Multi Etnik di Kota Malang) (2004), (3) Kekerasan Politik dalam Pemilu Studi Kasus di Kota Malang(2003), (4) Pemahaman dan Perilaku Politik Massa Perifer di perkotaan dan Persepektif Sosiologi Politik (2004), (5) Model Pembangunan dan Dampaknya Bagi Kehidupan Masyarakat Pinggiran Kota Malang (2003), (6) Politik Implementasi Kebijakan (Studi tentang Pembangunan di Indonesia dalam Persepektif Sistem Politik dari David Easton) (2002), (7) Pemahaman Warga tentang Nilai Institusional Sosial Budaya dan Politik Lokal dalam Konteks Pembangunan Desa (2001), (8) Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Malang (2000) (9) Reformasi Peran TNI dalam Era Demokratisasi Studi di Kota

Malang (2000), (10) Politik Kebijakan Kependudukan Orde Baru dalam Persepektif Hubungan Negara dan Masyarakat (1999), (11) *Collaboration Partnership* Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Daerah Aliran Sungai untuk Keberlanjutan Sungai Strategis Nasional (Studi di DAS Brantas Jawa Timur) (2013-2014).

Penulis juga aktif mengikuti seminar dan menjadi pembicara dalam berbagai kesempatan. Sedangkan karya ilmiah dan buku yang pernah ditulis antara lain; (1) "Spatial Urban Policy And Globalization: (2001) Procceding, International Seminar: Globalization: Social Cost and Benefits for The Third World , Surakarta: UNS, (2) "Politik Kebijakan Pangan: Intervensi Negara vs Kepentingan Petani" dalam buku Kebijakan Elitis Politik Indonesia, Pustaka Pelajar-FISIP UMM 2006 (penulis dan tim Editor), dan menyumbangkan tulisannya dalam buku Agama Tradional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger, LKiS-Fisip UMM. E-Mail: 2003. [sulis226@gmail.com](mailto:sulis226@gmail.com)

\*\*\*



**Salahudin, S.IP, M.Si.,** lahir pada tahun 1987 di Desa Kendo (sekarang kelurahan Kendo) Kota Bima. Sekolah Dasar ditempuh di SDN Inpres 2 Kempo Dompus, Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh di SMP Negeri 4 Kempo (Sekarang SMP Negeri 2 Manggelewa), Sekolah Menengah Atas ditempuh di SMA Negeri 1 Manggelewa Dompus. Gelar Sarjana (S.IP.) diperoleh di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang dengan lulusan ter-

baik pertama tingkat fakultas, dan terbaik kedua tingkat universitas. Gelar magister (M.Si.) diperoleh di Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis aktif menjalankan program penelitian, diantaranya: "Proses Politik Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) (Studi di Kota Batu Jawa Timur)", "Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan APBD Kota Malang", "Model Pembangunan Desa di Era Otonomi Desa", "Model Kebijakan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Malang", "Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Banjararum Kabupaten Malang", "Model Gerakan Sosial dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang".

Penulis juga aktif menjalankan program pengabdian kepada masyarakat, diantaranya: "Perintisan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aisyiyah Dau Malang", "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa bagi Pemerintah Desa Banjararum Kabupaten Malang", "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa bagi Pemerintah Desa Pendem Kota Batu", "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Banjararum dalam Pembuatan Produk Hukum Desa".

Penulis aktif menulis buku, jurnal, dan opini. Buku yang pernah dipublikasikan: "Demokrasi, Globalisasi, dan Masyarakat Sipil (Kontributor, 2011)", "Kalose Pemikiran Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (Kontributor, 2010)", "Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah (Mandiri, 2012). Pernah menulis di jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan APBD di Kab. Dompu". Ratusan artikel opini telah tersebar diberbagai media masa (cetak dan elektronik).

Penulis pernah menjadi Direktur Umum LSM LAPINDA-BIDOS (2009-2012), Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aisyiyah Dau Malang (2012-2014), Ketua Divisi Publikasi dan Penerbitan Pusat Kajian Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang (2012-2013), Staf Ahli Tidak Tetap Wakil Bupati Malang (2012-2013), Anggota Aktif Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) (2012-2014), dan

Tim Penyusunan Borang dan Evaluasi Diri Akreditasi Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis dapat dihubungi via email: [udin.pemerintahan@gmail.com](mailto:udin.pemerintahan@gmail.com), dan via facebook: salahudin udin.

